



KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

RENCANA STRATEGIS **KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

TAHUN
**2017-
2022**



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Allah SWT, Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2017-2022 telah dapat diselesaikan sebagai kewajiban yang diamanatkan secara rutin setiap lima tahun setelah penetapan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. Renstra ini merupakan acuan utama bagi seluruh entitas di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2017-2022.

Penyusunan Renstra ini berpedoman pada RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, serta berpedoman pada tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Kota Administrasi.

Dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran pembangunan Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2017-2022 perlu adanya keterlibatan pemangku kepentingan serta dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam mensukseskan pembangunan di wilayah Jakarta Pusat.

Akhirnya, semoga Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2017-2022 ini dapat menjadi pedoman bagi para pelaksana di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam melakukan tugasnya.

Jakarta, Juli 2018

Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat

Bayu Meghantara
NIP 197205201991011001

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Landasan Hukum.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
1.5 Keterkaitan Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan RPJMD.....	11
BAB 2 GAMBARAN UMUM DAN PELAYANAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	
2.1 Gambaran Umum Wilayah.....	12
2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Walikota Jakarta Pusat.....	15
2.2.1 Tugas.....	16
2.2.2 Fungsi.....	16
2.2.3 Struktur Organisasi.....	17
2.3 Sumber Daya.....	21
2.3.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur.....	21
2.3.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....	22
2.3.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	23
2.3.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan.....	24
2.3.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	25
2.3.6 Sarana dan Prasarana.....	26
2.4 Kinerja Kota Administrasi Jakarta Pusat Periode 2013-2017.....	27
2.5 Tantangan dan Peluang Kota Administrasi Jakarta Pusat.....	39
BAB 3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi.....	45
3.2 Telaah Visi, Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022.....	50
3.3 Arah Kebijakan Kewilayahan Jakarta Pusat Berdasarkan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022.....	58
3.4 Isu-Isu Strategis.....	68
BAB 4 TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	70
BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat.....	73
5.2.1 Strategi.....	74
5.2.2 Arah Kebijakan.....	75
BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan.....	77
BAB 7 INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
7.1 Indikator Kinerja Kota Administrasi Jakarta Pusat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.....	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Penyusunan Renstra.....	7
Gambar 1.2	Keterkaitan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	11
Gambar 2.1	Peta Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat.....	12
Gambar 2.2	Piramida Penduduk Kota Administrasi Jakarta Pusat 2016.....	15
Gambar 2.4	Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Pusat.....	20
Gambar 2.5	Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Pusat 2013-2016.....	43
Gambar 3.1	Penataan Kawasan Johar Baru.....	60
Gambar 3.2	Pengembangan Kawasan Senen.....	63
Gambar 3.3	Penataan Kawasan Pasar Baru.....	65
Gambar 3.4	Penataan Kawasan Tanah Abang.....	67
Gambar 3.5	Struktur Pembentuk Isu-Isu Strategis Kota Adm Jakarta Pusat.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat.....	13
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan.....	14
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur.....	21
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....	22
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	23
Tabel 2.6	Jumlah Pegawai Menurut Jabatan.....	24
Tabel 2.7	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	25
Tabel 2.8	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan.....	26
Tabel 2.9	Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis Pada Tahun 2017.....	26
Tabel 2.10	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Pusat Periode 2013-2017.....	27
Tabel 2.11	Realisasi Anggaran Kota Administrasi Jakarta Pusat Periode 2013-2017...	34
Tabel 2.12	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di DKI Jakarta September 2015 - Maret 2016 - September 2016.....	40
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Makro Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi...	46
Tabel 3.2	Identifikasi Permasalahan Bagian Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi...	47
Tabel 3.3	Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam Mewujudkan Misi RPJMD.....	54
Tabel 3.4	Isu Strategis Kota Adm Jakarta Pusat.....	69
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran Jangka Menengah.....	71
Tabel 5.1	Analisa SWOT.....	73
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	76
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif.....	89
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Kota Administrasi Jakarta Pusat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.....	111

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk jangka waktu 5 tahun dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Disamping itu, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), menyatakan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, dan ayat (2) menyatakan bahwa “Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Kota Administrasi Jakarta Pusat merupakan unsur pembantu Gubernur dan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan

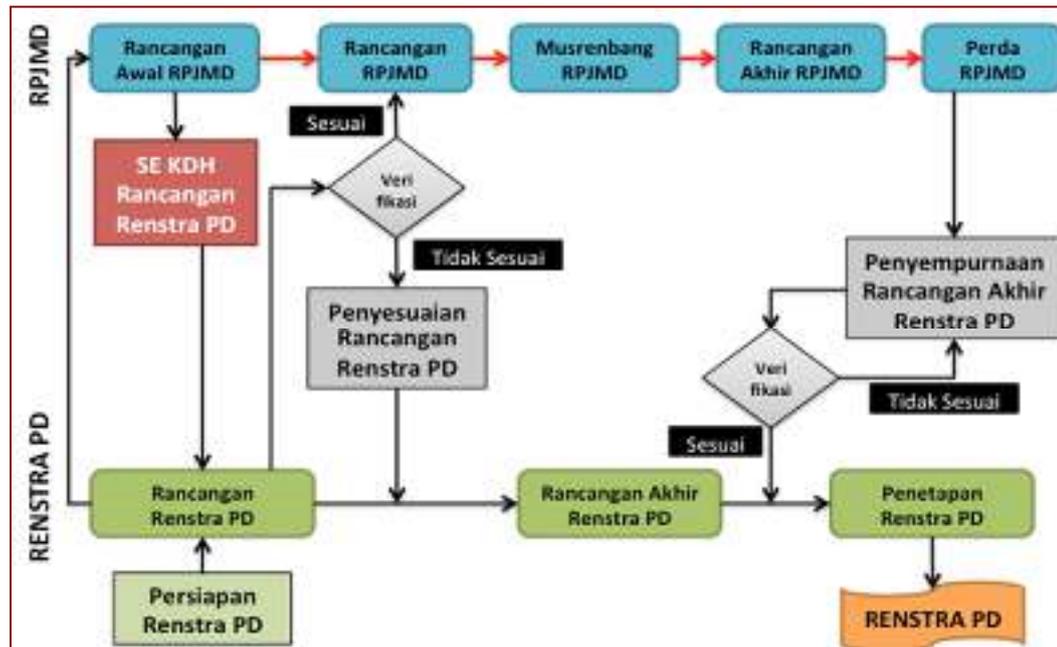
pemerintahan umum di wilayahnya, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, Kota Administrasi Jakarta Pusat wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat disusun berdasarkan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2022.

Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) digunakan Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan selama periode lima tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang secara rinci dijabarkan dalam Lampiran peraturan tersebut. Proses penyusunan Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Penyusunan rancangan Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Penetapan Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat sampai dengan penetapan Renstra OPD dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut :



Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat Periode 2017-2022

Dengan disusunnya Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat Periode 2017-2022 maka seluruh entitas Kota Administrasi Jakarta Pusat diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan urusan pemerintahan umum (mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur) dengan memperhatikan keselarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap PD, sehingga Kota Administrasi Jakarta Pusat dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta 2017-2022.

1.2 Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2017-2022, sejumlah rujukan peraturan perundangan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 12) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 13) Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;
 - 14) Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
 - 15) Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025;
 - 16) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 17) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018;
 - 18) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022
 - 19) Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
 - 20) Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Kota Administrasi.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam periode 2017-2022;
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam melaksanakan fungsinya.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kinerja Kota Administrasi Jakarta Pusat.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Umum dan Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Pusat

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Kota Administrasi Jakarta Pusat; kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam menjalankan tugas dan fungsinya; kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Kota Administrasi Jakarta Pusat.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Pusat
- 2.2 Sumberdaya Kota Administrasi Jakarta Pusat
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Pusat
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Pusat

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada bab ini terdapat 5 (lima) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kota Administrasi Jakarta Pusat; telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih; telaah kebijakan kewilayahan Jakarta Pusat, serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Pusat
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Arah Kebijakan Kewilayahan Jakarta Pusat Berdasarkan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022
- 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV Tujuan, dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Bab V Strategi dan Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif

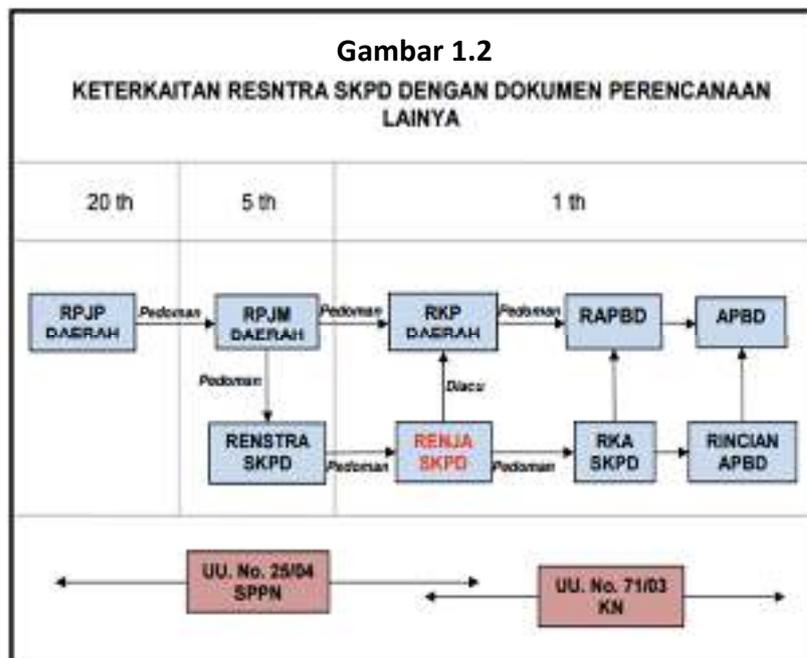
Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kota Administrasi Jakarta Pusat periode 2017-2022.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.



Berdasarkan gambar di atas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022 dan selanjutnya Dokumen Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta Anggaran tahunan Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam dokumen Renja dan RKA.

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN KINERJA PELAYANAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

2.1 Gambaran Umum Wilayah

Secara astronomis Kota Jakarta Pusat terletak antara $106^{\circ} 22'42''$ BT sampai dengan $106^{\circ} 58'18''$ BT dan $5^{\circ} 19'12''$ LS sampai dengan $6^{\circ} 23'54''$ LS. Luas Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar $48,13 \text{ Km}^2$, dengan kondisi permukaan tanah relatif datar, terletak sekitar 4 meter diatas permukaan laut. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Administrasi Jakarta Pusat disebelah utara berbatasan langsung dengan wilayah Jakarta Utara dan Barat, sebelah timur berbatasan dengan Jakarta Timur, sebelah Pusat berbatasan dengan Jakarta Pusat dan Timur serta disebelah barat berbatasan dengan Jakarta Barat.



Gambar 2.1 Peta Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Sumber : Jakarta Pusat Dalam Angka (Diolah)

Kota Administrasi Jakarta Pusat terdiri dari 8 kecamatan dan 44 kelurahan, lebih lanjut dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Jumlah Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat

No	Kecamatan	No	Kelurahan
1	Kecamatan Tanah Abang	1	Gelora
		2	Bendungan Hilir
		3	Karet Tengsin
		4	Kebon Melati
		5	Petamburan
		6	Kebon Kacang
		7	Kampung Bali
2	Kecamatan Menteng	1	Menteng
		2	Pegangsaan
		3	Cikini
		4	Gondangdia
		5	Kebon Sirih
3	Kecamatan Senen	1	Kenari
		2	Paseban
		3	Kramat
		4	Kwitang
		5	Senen
		6	Bungur
4	Kecamatan Johar Baru	1	Johar Baru
		2	Kampung Rawa
		3	Tanah Tinggi
		4	Galur
5	Kecamatan Cempaka Putih	1	Rawasari
		2	Cempaka Putih Timur
		3	Cempaka Putih Barat
6	Kecamatan Kemayoran	1	Harapan Mulya
		2	Cempaka Baru
		3	Sumur Batu
		4	Serdang
		5	Utan Panjang
		6	Kebon Kosong
		7	Kemayoran
		8	Gunung Sahari Selatan
7	Kecamatan Sawah Besar	1	Pasar Baru
		2	Gunung Sahari Utara
		3	Kartini
		4	Karang Anyar
		5	Mangga Dua Selatan

8	Kecamatan Gambir	1	Cideng
		2	Petojo Selatan
		3	Gambir
		4	Petojo Utara
		5	Kebon Kelapa
		6	Duri Pulo

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Pusat

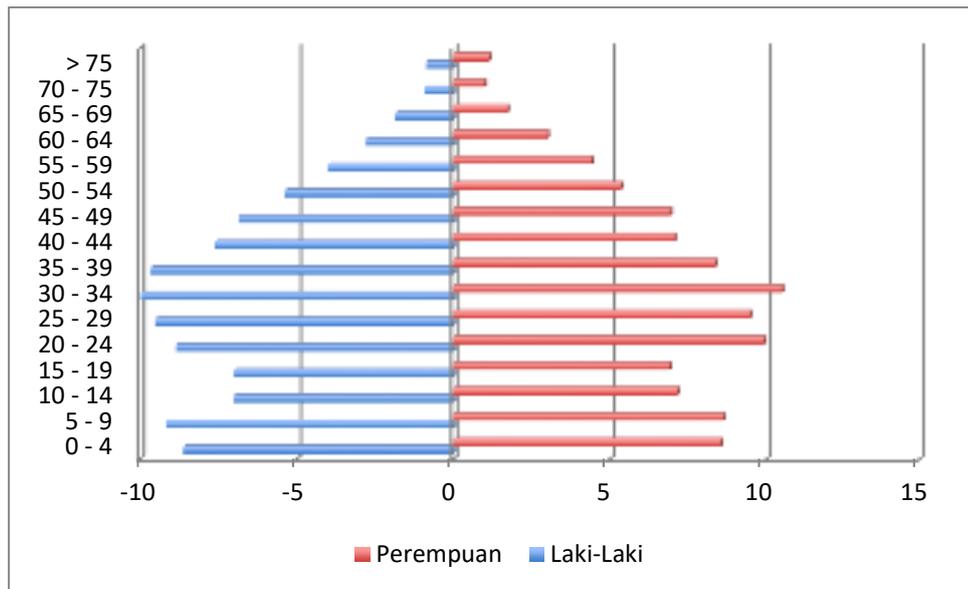
Jumlah penduduk Kota Jakarta Pusat tahun 2016 berdasarkan proyeksi penduduk hasil Sensus Penduduk 2010 sebesar 921.344 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 0.78 persen. Kepadatan penduduk Kota Jakarta Pusat tahun 2016 adalah 19.143 jiwa setiap 1 Km². Kecamatan Johar Baru memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Kota Jakarta Pusat yaitu sebesar 50.006 Jiwa/Km² sebagaimana tercantum pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2017			% Penduduk	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk/ Km ²	Sex Ratio
		L	P	Total				
1	Tanah Abang	92.495	88.640	181.135	15,91	9,3	15.775	101.89
2	Menteng	46.695	45.899	92.594	8,13	6,5	10.461	95.69
3	Senen	65.954	63.528	129.482	11,37	4,2	22.934	97.92
4	Johar Baru	74.147	71.145	145.292	12,76	2,38	50.005	100.56
5	Cempaka Putih	50.558	50.178	100.736	8,84	4,69	18.205	103.50
6	Kemayoran	130.393	127.427	257.820	22,64	7,25	31.142	100.87
7	Sawah Besar	66.412	65.629	132.041	11,59	6,16	16.346	95.52
8	Gambir	50.255	48.991	99.246	8,71	7,59	10.331	99.55
Total				1.138.346	100	48,13	50.006	99.43

Sumber : Sulin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat

Selanjutnya penduduk di Kota Administrasi Jakarta Pusat dapat ditinjau berdasarkan struktur umurnya, berdasarkan piramida penduduk pada Gambar 2.2, dapat diketahui komposisi penduduk Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2016.



Gambar 2.2 Piramida Penduduk Kota Administrasi Jakarta Pusat 2016

Sumber : Susenas 2016

Terlihat dari bentuk piramida penduduk yang menyerupai segitiga, Penduduk Kota Administrasi Jakarta Pusat dapat dikatakan berstruktur umur muda. Hal ini dapat dilihat dari persentase penduduk usia anak-anak (0 – 14 tahun) sebesar 24 persen, jumlah penduduk yang berusia produktif (15 – 64 tahun) berjumlah 71,97 persen, dan jumlah penduduk lansia (≥ 65 tahun) tergolong kecil yaitu 6,9 persen.

2.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Pusat

Sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi, Kota Administrasi Jakarta Pusat berkedudukan sebagai unsur pembantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Camat dan Lurah serta mengoordinasikan, memantau dan mengawasi operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Dalam kedudukannya sebagai unsur pembantu Gubernur, Kota Administrasi Jakarta Pusat mempunyai tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut.

2.2.1. Tugas

Kota Administrasi Jakarta Pusat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Jakarta Pusat, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayah Jakarta Pusat, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur.

2.2.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Kota Administrasi;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Kota Administrasi;
- c. penetapan keputusan taktis operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayahnya;
- e. pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan masyarakat di wilayahnya;
- f. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- g. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- h. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kota administrasi;
- j. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
- k. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;

- l. pemantauan dan pemetaan situasi dan kondisi wilayah Kota Administrasi;
- m. pelaksanaan dan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah tingkat wilayah Kota Administrasi;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kota;
- o. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Kota Administrasi;
- p. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kota Administrasi;
- q. pengelolaan kearsipan, data, dan informasi Kota Administrasi; dan
- r. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi.

Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Kota Administrasi Jakarta Pusat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Gubernur untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi :

- a. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. kesehatan;
- c. sosial;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- f. koperasi, usaha kecil, dan menengah.

2.2.3 Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Pusat

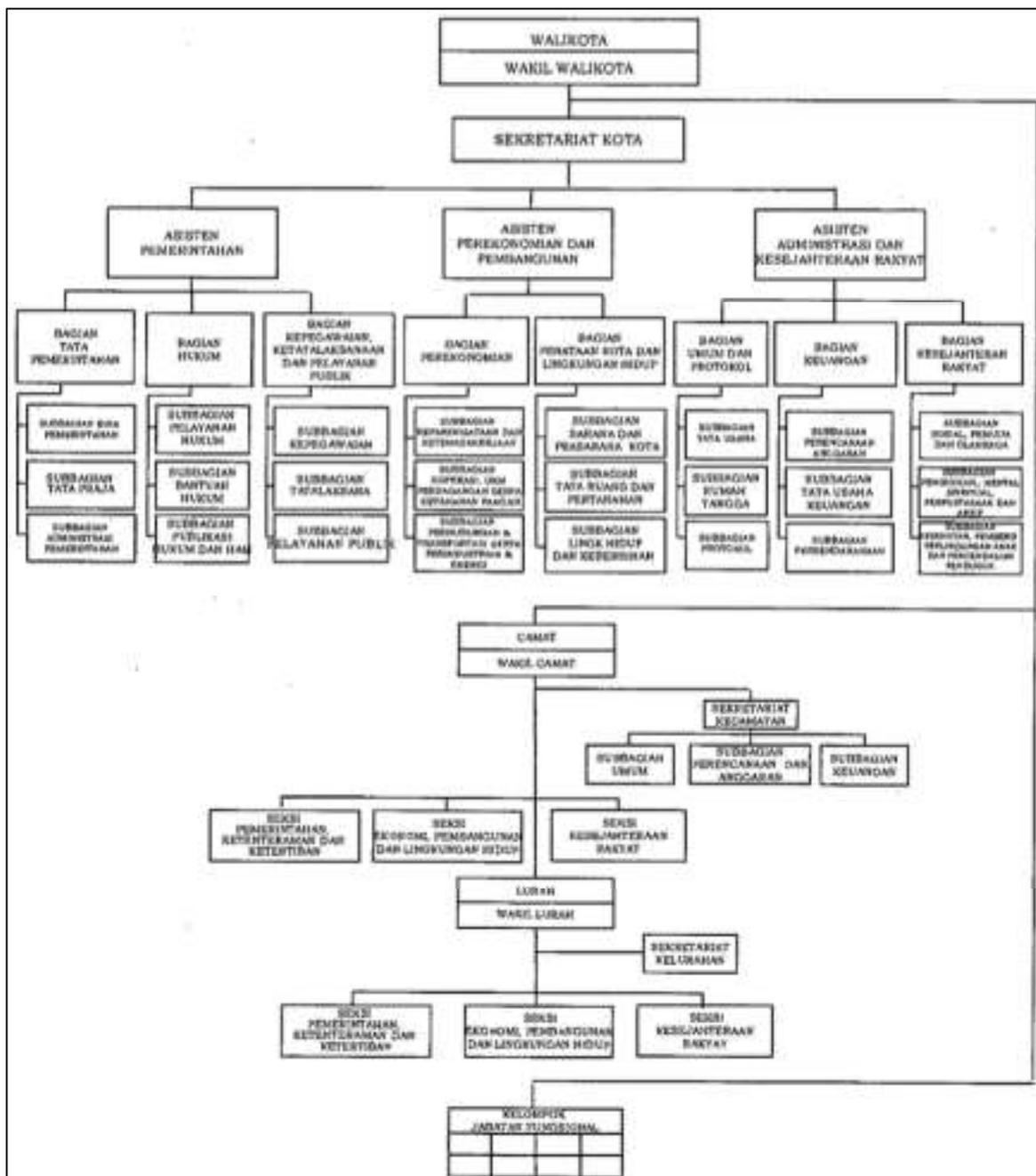
Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Pusat terdiri dari :

- a. Walikota;
- b. Wakil Walikota
- c. Sekretariat Kota, terdiri dari :
 - 1. Asisten Pemerintahan, terdiri dari :
 - a) Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari:

- 1) Subbagian Bina Pemerintahan;
 - 2) Subbagian Tata Praja; dan
 - 3) Subbagian Administrasi Pemerintahan.
- b) Bagian Hukum, terdiri dari:
- 1) Subbagian Pelayanan Hukum;
 - 2) Subbagian Bantuan Hukum; dan
 - 3) Subbagian Publikasi Hukum dan HAM.
- c) Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik, terdiri dari:
- 1) Subbagian Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Tatalaksana; dan
 - 3) Subbagian Pelayanan Publik.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
- a) Bagian Perekonomian, terdiri dari:
- 1) Subbagian Kepariwisata dan Ketenagakerjaan;
 - 2) Subbagian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Ketahanan Pangan; dan
 - 3) Subbagian Perhubungan serta Perindustrian dan Energi.
- b) Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
- 1) Subbagian Sarana dan Prasarana Kota;
 - 2) Subbagian Tata Ruang dan Pertanahan; dan
 - 3) Subbagian Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
3. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
- a) Bagian Umum dan Protokol, terdiri dari:
- 1) Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Subbagian Rumah Tangga; dan
 - 3) Subbagian Protokol.
- b) Bagian Keuangan, terdiri dari:
- 1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran;
 - 2) Subbagian Tata Usaha Keuangan; dan

- 3) Subbagian Perbendaharaan.
- c) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Sosial, Pemuda dan Olahraga;
 - 2) Subbagian Pendidikan, Mental, Spiritual, Perpustakaan dan Arsip;
dan
 - 3) Subbagian Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.
- d. Kecamatan, terdiri dari :
 - 1. Camat;
 - 2. Wakil Camat;
 - 3. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum;
 - b) Subbagian Perencanaan dan Anggaran; dan
 - c) Subbagian Keuangan.
 - 4. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - 5. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
 - 6. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
 - 7. Kelurahan, terdiri dari :
 - a) Lurah;
 - b) Wakil Lurah;
 - c) Sekretariat Kelurahan;
 - d) Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - e) Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
 - f) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional

Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam Gambar 2.3 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja sesuai Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi.



Gambar 2.4. Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Pusat

Sumber : Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Kota Administrasi.

2.3 Sumber Daya

Sampai dengan awal tahun 2018, jumlah pegawai Kota Administrasi Jakarta Pusat dan jajarannya sebanyak 129 orang dengan profil demografi sebagai berikut:

2.3.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.2 jumlah pegawai Kota Administrasi Jakarta Pusat paling banyak berada di kelompok umur lebih dari 50 tahun yaitu sebanyak 43 orang (33%). Sedangkan kelompok umur 46-50 tahun sebanyak 20 orang (15,5%) dan kelompok umur 41-45 tahun sebanyak 17 orang (13,7%). Untuk kelompok umur 36-40 tahun sebanyak 13 orang (10%), dan kelompok umur 31-35 tahun sebanyak 23 orang (17,8%), serta kelompok umur 26-30 tahun sebanyak 12 orang (9,3%). Adapun kelompok umur yang jumlahnya paling sedikit adalah kelompok umur 20-25 tahun sebanyak 1 orang (0,7%). Kondisi demikian bermakna dalam tujuh tahun mendatang terdapat 33% pegawai yang akan memasuki masa pensiun, sehingga perlu diantisipasi untuk menambah jumlah pegawai pada periode selanjutnya.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur
Kantor Walikota Jakarta Pusat

No.	Unit Wilayah	Golongan							Jumlah
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	> 50	
1	Walikota							1	1
2	Wakil Walikota					1			1
3	Sekretariat Kota					1			1
4	Asisten Pemerintahan							1	1
4.1	Bagian Tata Pemerintahan	1	4	4		2	2	2	15
4.2	Bagian Hukum		1	1			3	9	14
4.3	Bagian Kepegawaian, Tatalaksanaan dan Pelayanan Publik		2	1	2	1	3	2	11
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan					1			1
5.1	Bagian Perekonomian		1				2	6	9
5.2	Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup				3	4	1	7	15

No.	Unit Wilayah	Golongan							Jumlah
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	> 50	
6	Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat						1		1
6.1	Bagian Umum dan Protokol		4	9	3	3	3	7	29
6.2	Bagian Keuangan			4	2	2	3	4	15
6.3	Bagian Kesejahteraan Rakyat			4	3	2	2	4	15
TOTAL		1	12	23	13	17	20	43	129

Sumber : Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Pusat

2.4.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel 2.4 diketahui pegawai terbanyak menempati golongan III sebanyak 83 orang (64%), selebihnya yang menempati golongan IV sebanyak 26 orang (20%), kemudian golongan II sebanyak 18 orang (13%) serta pegawai yang menempati golongan I sebanyak 2 orang (1,5%). Data tersebut menunjukkan 64 persen pegawai memiliki kesempatan untuk mengembangkan karir. Sehingga Subbagian Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Pusat perlu melakukan pembinaan pengembangan karir pegawai agar potensi pegawai dapat dikembangkan secara optimal.

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kantor Walikota Jakarta Pusat

No.	Unit Wilayah	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Walikota				1	1
2	Wakil Walikota				1	1
3	Sekretariat Kota				1	1
4	Asisten Pemerintahan				1	1
4.1	Bagian Tata Pemerintahan		2	12	1	15
4.2	Bagian Hukum		2	6	6	14
4.3	Bagian Kepegawaian, Tatalaksanaan dan Pelayanan Publik		2	7	2	11
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan			5	1	6
5.1	Bagian Perekonomian				4	4
5.2	Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup		2	9	4	15
6	Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat				1	1
6.1	Bagian Umum dan Protokol	1	8	19	1	29
6.2	Bagian Keuangan			14	1	15
6.3	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1	2	11	1	15
TOTAL		2	18	83	26	129

Sumber : Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Pusat

2.4.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan Tabel 2.5 sebagian besar pegawai Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 56 orang (43%), sedangkan selebihnya memiliki tingkat pendidikan S2 sebanyak 33 orang (25%), S3 sebanyak 1 (satu) orang (0,7%), D4 sebanyak 4 (empat) orang (3,1%), D3 sebanyak 5 (lima) orang (3,8%), SMA sebanyak 25 orang (19,3%) dan SMP sebanyak 4 (empat) orang (3,1%). Dapat disimpulkan bahwa secara umum pegawai Kota Administrasi Jakarta Pusat sudah baik karena 71% pegawainya memiliki tingkat pendidikan akademik S1/D4 ke atas, atau dengan kata lain 71% pegawai Kota Administrasi Jakarta Pusat telah memiliki (1) kemampuan mengingat informasi secara umum dan luas, dalam domain Kognitif, (2) kemampuan menerjemahkan dan mengubah informasi ke dalam berbagai bentuk media (angka, kalimat, gambar), (3) kemampuan mengaplikasikan suatu informasi, konsep, teori atau metode memecahkan masalah, (4) kemampuan analisis untuk menjabarkan struktur persoalan sehingga mudah dipahami, (5) kemampuan sintesis dalam berfikir, dan (6) kemampuan melakukan penilaian berdasarkan suatu kriteria yang baku dengan metode ilmiah (*Benjamin S. Bloom, 1956*).

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Kantor Walikota Jakarta Pusat

No.	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan								Jumlah
		SMP	SMA	D2	D3	D4	S1	S2	S3	
1	Walikota							1		1
2	Wakil Walikota								1	0
3	Sekretariat Kota							1		1
4	Asisten Pemerintahan							1		1
4.1	Bagian Tata Pemerintahan		3			2	7	3		15
4.2	Bagian Hukum		1				7	6		14
4.3	Bagian Kepegawaian,		1		1		5	4		11

No.	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan							Jumlah	
		SMP	SMA	D2	D3	D4	S1	S2		S3
	Tatalaksanaan dan Pelayanan Publik									
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan							1		1
5.1	Bagian Perekonomian						6	3		9
5.2	Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup	1	1				7	6		15
6	Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat		13				1			14
6.1	Bagian Umum dan Protokol	2	2	1	3	2	6	2		18
6.2	Bagian Keuangan		4		1		10	2		17
6.3	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1					7	3		11
TOTAL		4	25	1	5	4	56	33	1	129

Sumber : Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Pusat

2.3.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Kota Administrasi Jakarta Pusat, saat ini dari 37 jabatan struktural yang tersedia, dan seluruh jabatan tersebut telah terisi sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.6. Sedangkan sisanya (92 orang) adalah fungsional pelaksana (staf). Namun kebutuhan jabatan fungsional tersebut belum dipetakan, sehingga Kota Administrasi Jakarta Pusat belum dapat menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi Kota Administrasi Jakarta Pusat sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Kantor Walikota Jakarta Pusat

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	3
2	Eselon III	11
3	Eselon IV	23
4	Fungsional Tertentu	-
5	Fungsional Tertentu (Staf)	92
TOTAL		129

Sumber : Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Pusat

2.3.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Kota Administrasi Jakarta Pusat didominasi oleh pegawai berjenis kelamin laki-laki sebesar 55,8% sedangkan pegawai berjenis kelamin perempuan sebesar 44%. Kondisi demikian menggambarkan bahwa Kota Administrasi Jakarta Pusat berkontribusi signifikan terhadap besaran Indeks Pemberdayaan Gender di Provinsi DKI Jakarta untuk variabel keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional. Secara numerik dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.7 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Walikota		1	1
2	Wakil Walikota		1	1
3	Sekretariat Kota		1	1
4	Asisten Pemerintahan		1	1
4.1	Bagian Tata Pemerintahan	7	8	15
4.2	Bagian Hukum	8	6	14
4.3	Bagian Kepegawaian, Tatalaksanaan dan Pelayanan Publik	8	3	11
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan		1	1
5.1	Bagian Perekonomian	4	5	9
5.2	Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup	6	9	15
6	Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat		1	1
6.1	Bagian Umum dan Protokol	11	18	29
6.2	Bagian Keuangan	6	9	15
6.3	Bagian Kesejahteraan Rakyat	7	8	15
TOTAL		57	72	129

Sumber : Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Pusat

Sedangkan bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan maka pegawai berjenis kelamin laki-laki lebih mendominasi jabatan struktural sebesar 22 orang, adapun pegawai berjenis kelamin perempuan hanya sebesar 15 orang yang menduduki jabatan struktural. Lebih lanjut dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.8 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II		3	3
2	Eselon III	3	8	11
3	Eselon IV	12	11	23
TOTAL		15	22	37

Sumber : Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Pusat

2.3.6 Sarana dan Prasarana Kota Administrasi Jakarta Pusat

Disamping sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas Kota Administrasi Jakarta Pusat, juga terdapat sarana dan prasarana yang dimiliki Kota Administrasi Jakarta Pusat. Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi peralatan komputer/telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama lainnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi Jakarta Pusat. Berdasarkan Tabel 2.9, kondisi sarana prasarana di Kota Administrasi Jakarta Pusat telah memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Lebih lanjut, data aset khususnya aset tetap berupa peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik.

Tabel 2.9 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Kota Administrasi Jakarta Pusat s/d Tahun 2017

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak	
1.	Kendaraan roda 4	15	15	-	
2.	Kendaraan roda 2	23	5	18	
3.	Komputer/Laptop	40			

Sumber : Bagian Umum dan Protokol

2.4 Kinerja Kota Administrasi Jakarta Pusat Periode 2013-2017

Gambaran Capaian kinerja pelayanan dan kinerja keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya pada periode 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.10 dan Tabel 2.11.

Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Pusat Periode 2013-2017

No	Indikator	Target				Realisasi				% Capaian			
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah pelatihan pegawai dilaksanakan.	12 kali				12 kali				100			
2	Persen pegawai yang memahami Iptek.	90%				90%				100			
3	Persen pegawai yang mampu mengoperasikan internet.	90%				90%				100			
4	Jumlah layanan Perizinan terpadu yang diselenggarakan.	35 Jenis				35 Jenis				100			
5	Jumlah layanan Non Perizinan terpadu yang diselenggarakan.	7 Jenis				7 Jenis				100			
6	Frekuensi layanan mobile kependudukan	40 Kali				38 Kali				95			
7	Pelayanan Terpadu Malam Hari	24 Kali				21 Kali				87,50			
8	APM pada SD/MI	92%				93,23%				101,34			
9	APM pada SMP/MTs	75%				75,63%				100,84			
10	Persentase Kelulusan SD	99%				99,99%				101			
11	Persentase Kelulusan SMP	99%				99,02%				100,02			
12	Angka Kesembuhan Pengobatan TB	85%				85%				100			
13	Persen Penderita DBD yang Ditangani	100%				100%				100			
14	Cakupan Minimal Jenis Tindakan Medis yang disediakan RS	99%				99%				100			
15	Jumlah Trotoar dipelihara	60.000 m ²				60,942 m ²				101,57			
16	Jumlah Jalan dipelihara	300.000 m ²				317,354 m ²				99,28			
17	Forum pengembangan usaha	2 Kali				2 Kali				100			
18	Tenaga kerja dilatih	300 Orang				300 Orang				100			
19	Persentase koperasi yang aktif.	100%	100			100%	90			100	90		
20	Jumlah anggota usaha kecil yang menerima sosialisasi kewirausahaan.	150 Orang				150 Orang				100			
21	Persentase pemberian Tanda Daftar Perusahaan.	100%				100%				100			
22	Jumlah pelaksanaan apresiasi budaya.	6 Kali				6 Kali				100			
23	Jumlah Wisatawan Mancanegara (orang).	350.000				357.507				102,14			
24	Jumlah Wisatawan Nusantara (orang).	2.000.000				2.062.401				103,12			
25	Forum Silaturahmi Tokoh Masyarakat.	4 Kali				4 Kali				100			
26	Dialog interaktif ketahanan nasional.	4 Kali				4 Kali				100			
27	Jumlah kantor lurah yang memenuhi standar.	12 unit				12 unit				100			
28	Kader Pemberdayaan Masyarakat yang dibina.	80 Orang				88 Orang				110			
29	Pengelola Badan Keswadayaan Masyarakat yang dibina.	80 Orang				80 Orang				100			
30	Prosentase Cakupan Usaha Mikro yang tertata pada lokasi binaan		400UKM				400				100		

RENCANA STRATEGIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 2017-2022

No	Indikator	Target				Realisasi				% Capaian			
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
31	Prosentase peningkatan pemasaran Produk UKM		378 UKM				378				100		
32	Prosentase peningkatan ekspor produk dalam negeri		35000				36000				109		
33	Prosentase penempatan para pencari kerja pada penyelenggaraan Bursa Kerja (Job Fair)		2000 Pencari Kerja				257 pencari kerja				12,85		
34	Jumlah Wira Usaha baru yang aktif		50				50				100		
35	Cakupan Masyarakat pengguna Tehnologi Tepat Guna (TTG) yang mandiri		100 orang				100 orang				100%		
36	Cakupan anggota LMK yang aktif terlibat dalam pergerakan kegiatan Gotong Royong		44 Kelurahan				44 Kelurahan				100%		
37	Prosentase Capaian Ketertiban Umum dan jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) serta PMKS		40 lokasi				25 lokasi				62,50%		
38	Prosentase Penyelenggaraan Sidang Yustisi terhadap Pelanggaran Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.		12x sidang				8x sidang				66,70%		
39	Cakupan pengawasan tempat Usaha Hiburan dan UUG		150 tempat usaha				150 tempat usaha				100%		
40	Jumlah perkara yang diselesaikan pengadilan tingkat Kota/Kabupaten		5 perkara				6 perkara				120%		
41	Penanganan kasus dan sengketa dengan instansi terkait		60 kasus				50 kasus				83%		
42	Tatanan pemenuhan kriteria Kota Sehat		8				8				100%		
43	Prosentase Kelurahan Layak Anak		40 kelurahan				6 kelurahan				15%		
44	Jumlah PUS yang menjadi peserta KB baru		61.821				63.726				103,08%		
45	Prosentase Cakupan Anggota Bina Keluarga ber-KB		75%				79,29%				104,72%		
46	Prosentase Cakupan PUS usia <20 tahun		2,6%				2,6%				100%		
47	Kasus DBD dilakukan penyelidikan epidemiologi		61.821				63.726				103,08%		
48	Prosentase PUSKESMAS yang melakukan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular		75%				79,29%				104,72%		
49	Angka Bebas Jentik (ABJ) di 7 (tujuh) Tatanan		95%				98%				103%		
50	Meningkatnya jumlah tatanan memenuhi kriteria Kota Sehat pada setiap Kabupaten/Kota												
51	Prosentase Korban Bencana yang ditangani		364 orang				353 orang				97%		
52	Prosentase PUSKESMAS yang menerapkan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergency Dasar (PONED)		100%				62,5%				62,5%		
53	Prosentase RSUD yang menerapkan Pelayanan												

RENCANA STRATEGIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 2017-2022

No	Indikator	Target				Realisasi				% Capaian			
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
	Obstetrik Neonatal Emergency Komprehensif												
54	Cakupan kunjungan Ibu Hamil (K4)		96%				95,3%				99,3%		
55	Cakupan pemberian Makanan Pendamping ASI pada anak 6 – 24 bulan keluarga miskin												
56	Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan												
57	Cakupan Kunjungan Neonatal (KN 1)		100%				100%				100%		
58	Jumlah Sarana Kesehatan yang dibangun		3 Puskesmas				3 Puskesmas				100%		
59	Jumlah PUSKESMAS keliling		10 pasar				10 pasar				100%		
60	Prosentase kasus campak sesuai prosedur Community Based Measles Surveillance (CBMS)		40%				60,5%				60,5%		
61	AFP rate lebih atau sama dengan 2/100.000 penduduk usia kurang dari 15 tahun		(> 2)				5 kasus (2)				100%		
62	Prosentase penerima BOP (khusus untuk sekolah Negeri)		100%				77.73%				77.73%		
63	Prosentase peningkatan hasil ujian nasional		100%				99.86%				99.86%		
64	Cakupan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan		81 Gedung				55 Gedung				60%		
65	Cakupan penerima BOS (untuk sekolah negeri dan swasta)		SD/SMP/ SMA/SMK Negeri & Swasta				SD/SMP/ SMA/SMK Negeri & Swasta				100%		
66	Prosentase tenaga pendidik memenuhi standar kompetensi		97%				97%				100%		
67	Prosentase siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP)		100%				92%				92%		
68	Jumlah keluarga miskin yang hidup mandiri		3.000 keluarga				2.843 keluarga				95%		
69	Jumlah PMKS potensial yang dapat hidup mandiri		275 orang				275 orang				100%		
70	Prosentase PMKS non potensial yang mendapat bantuan pemenuhan kebutuhan dasar		60%				60%				100%		
71	Jumlah penyaluran beras RASKIN		23.637				23.164,3				98%		
72	Jumlah Penerima Program Keluarga Harapan		4592 KSM				4592 KSM				100%		
73	Cakupan usaha mikro yang tertata pada lokasi binaan			420 Usaha Kecil Menengah (UKM)				420 Usaha Kecil Menengah (UKM)			100%		
74	Cakupan peningkatan pemasaran produk Usaha Kecil Menengah (UKM)			200 Usaha Kecil				200 Usaha Kecil Menengah			100%		

RENCANA STRATEGIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 2017-2022

No	Indikator	Target				Realisasi				% Capaian			
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
				Menengah (UKM)				(UKM)					
75	Cakupan peningkatan ekspor produk dalam negeri pada Usaha Kecil Menengah (UKM)			59.055 Dokumen				59.055 Dokumen			100%		
76	Prosentase Capaian Ketertiban Umum dan jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) serta PMKS			15 lokasi				15 lokasi			100%		
77	Prosentase Penyelenggaraan Sidang Yustisi terhadap Pelanggaran Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.			12x persidangan				12x persidangan			100%		
78	Cakupan pengawasan tempat Usaha Hiburan dan UUG			700 BAP				650 BAP			91%		
79	Jumlah perkara yang diselesaikan pengadilan tingkat Kota/Kabupaten			13 (tiga belas) Perkara				10 (sepuluh) Perkara			77%		
80	Penanganan kasus dan sengketa dengan instansi terkait			12 (dua belas) kasus				12 (dua belas) Perkara			100%		
81	Capaian penilaian pada Tataan Pemukiman, Sarana dan Prasarana Umum (>75%)			75-100				75-100			100%		
82	Capaian penilaian Tataan Sarana Tertib Lalulintas dan Pelayanan Transportasi (>75%)			75-100				75-100			100%		
83	Capaian penilaian Tataan Hutan Sehat (>75%)			75-100				75-100			100%		
84	Capaian penilaian Tataan Industri dan Perkantoran Sehat (>75%)			75-100				75-100			100%		
85	Capaian penilaian Tataan Pariwisata Sehat (>75%)			75-100				75-100			100%		
86	Capaian penilaian Tataan Ketahanan Pangan dan Gizi (>75%)			75-100				75-100			100%		
87	Capaian penilaian Tataan Kehidupan Sehat yang Mandiri (>75%)			75-100				75-100			100%		
88	Cakupan penilaian Kehidupan Sosial yang Mandiri (>75%)			75-100				75-100			100%		
89	Cakupan keluarga miskin yang hidup mandiri			3.600 orang				400 orang			11%		
90	Cakupan PMKS potensial yang dapat hidup mandiri			1.200 orang				0			0%		
91	Prosentase PMKS non potensial yang mendapat bantuan pemenuhan kebutuhan dasar			3.155 orang				0			0%		
92	Jumlah penyaluran beras RASKIN			23.637 jiwa				23.637 jiwa			100%		
93	Jumlah Penerima Program Keluarga Harapan			6.280 KSM				6.280 KSM			100%		
94	Cakupan jumlah siswa putus sekolah			8433				253			3,37%		
95	Prosentase peningkatan jumlah siswa lulus			4.834				3674			75,59%		
96	Prosentase cakupan sekolah bebas biaya pendidikan			162				162			100%		

RENCANA STRATEGIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 2017-2022

No	Indikator	Target				Realisasi				% Capaian			
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
97	Peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan			122.950				4.518					3,69%
98	Prosentase peningkatan jalan			46.581,04 m ²				46.734,14 m ²					100,32%
99	Prosentase peningkatan trotoar dan saluran tepi			10.237,90 m ²				32.330,53 m ²					315,79%
100	Prosentase Pemeliharaan berkala berat jalan (<i>pengaspalan</i>)			245.805,28 m ²				227.159,86 m ²					92,41%
101	Prosentase perbaikan jalan lingkungan/orang/saluran di wilayah			245.595,64 m ²				368.696,22 m ²					150,12%
102	Peningkatan rasio jumlah alat pemadam api terhadap kawasan rawan kebakaran			1 : 8				1 : 6					75%
103	Prosentase peningkatan jumlah mobil pompa yang siap dioperasikan			100%				98%					98%
104	Prosentase cakupan LPS Ramah Lingkungan			11 lokasi				9 lokasi					80%
105	Prosentase cakupan pemeliharaan Jembatan Penyeberangan Orang (<i>JPO</i>)			4 unit				4 unit					100%
106	Prosentase cakupan pemeliharaan Halte			99 Unit				99 Unit					100%
107	Prosentase cakupan pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas			91 Unit				91 Unit					100%
108	Prosentase cakupan pembangunan Rambu-rambu Lalu Lintas			169 Unit				169 Unit					100%
109	Prosentase cakupan pemeliharaan Marka dan Tanda Jalan			18.622,42 M'				18.622,42 M'					100%
110	Prosentase cakupan pemeliharaan sistem pompa, pintu air, serta kelengkapannya di Rumah Pompa			13 Rumah Pompa				13 Rumah Pompa					100%
111	Prosentase cakupan kali/sungai yang di sheetpile serta normalisasi saluran			6.000 m				4.982 m					83%
112	Pengukuran tingkat kualitas udara (<i>cakupan : sumber tidak bergerak</i>)			10 titik lokasi				10 titik lokasi					100%
113	Pengukuran tingkat kualitas udara (<i>cakupan : sumber bergerak</i>)			1.000 kendaraan				1.795 kendaraan					180%
114	Cakupan kualitas sumber air yang terpantau status mutu air (<i>air tanah dangkal dan air sungai</i>)			30 titik lokasi				9 titik lokasi					30%
115	Cakupan pengawasan dokumen lingkungan			96 dokumen				96 dokumen					100%
116	Prosentase jumlah penegakkan Hukum terkait Lingkungan Hidup			25 pengelola				42 pengelola					168%
117	Cakupan Sekolah Adiwiyata			30 sekolah				30 sekolah					100%
118	Cakupan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (<i>RPTRA</i>)			16 lokasi				16 lokasi					100%
119	Jumlah acara keprotokolan tingkat Kota Jakarta Pusat			1.100 acara				1.106 acara					
120	Cakupan pemenuhan status standarisasi terhadap Kantor Lurah			2				2					100
121	Prosentase jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan			118 orang				14 orang					12%

RENCANA STRATEGIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 2017-2022

No	Indikator	Target				Realisasi				% Capaian			
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
	dan Pelatihan (<i>Diklat</i>) Struktural												
122	Prosentase jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (<i>Diklat</i>) Fungsional			275 orang				194 orang			71%		
123	Prosentase jumlah aparatur yang mengikuti Tugas Belajar			2 orang				2 orang			100%		

Sumber : Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Setko Kota Administrasi Jakarta Pusat

Berdasarkan Tabel 2.10 di atas, dapat diketahui bahwa pada periode 2014-2016 indikator ukuran keberhasilan pelayanan Kota Administrasi Jakarta Pusat yang bersumber dari dokumen Lakip belum seluruhnya menggambarkan pelayanan Kota Administrasi Jakarta Pusat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Beberapa indikator bersifat komposit menggambarkan keberhasilan pelayanan OPD teknis, sehingga tidak dapat mengukur keberhasilan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Dalam perspektif kedepan, perumusan indikator ukuran keberhasilan pelayanan Kota Administrasi Jakarta Pusat akan terus ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat menghasilkan ukuran pelayanan yang dapat mengukur pelayanan Kota Administrasi Jakarta Pusat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Secara umum capaian kinerja Kota Administrasi Jakarta Pusat telah didominasi realisasi indikator yang mencapai target, yakni sebesar 73% indikator telah mencapai target. Adapun 33 indikator (26%) belum menunjukkan realisasi yang mencapai target, namun demikian indikator tersebut didominasi oleh indikator OPD teknis dimana Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki kontribusi yang sangat minim terhadap indikator-indikator tersebut.

Sedangkan untuk realisasi anggaran per program yang dilaksanakan pada tahun 2013 hingga tahun 2017 (Tabel 2.11) diketahui terdapat 43 program yang realisasi anggarannya dibawah 80% dari total 79 program.

Jika dibandingkan antara realisasi indikator kinerja pelayanan (73% mencapai target) dengan realisasi anggaran (54% realisasi anggaran program dibawah 80%), maka dapat dikatakan penetapan target anggaran tahunan terlalu optimis atau penetapan target kinerja pelayanan tahunan terlalu rendah. Dalam perspektif kedepan terus diupayakan perbaikan perumusan target anggaran yang sesuai dengan perumusan target kinerja pelayanan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.



2.4.1 Realisasi Anggaran Kota Administrasi Jakarta Pusat Periode 2013-2017

Tabel 2.11 Realisasi Anggaran Kota Administrasi Jakarta Pusat Periode 2013-2017

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke -					Persentase Realisasi Anggaran				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Program penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	50,487,635,000					45,736,219,313					91%				
2	Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	300,000,000					300,000,000					100%				
3	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	65,256,298,083					61,485,375,887					94%				
4	Program peningkatan kinerja Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi	22,472,060,000					20,562,750,695					92%				
5	Program peningkatan koordinasi Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi	7,985,000,000					6,964,426,990					87%				
6	Program peningkatan pelayanan Pemerintahan Kelurahan	610,000,000					496,325,000					81%				
7	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	450,000,000					434,237,500					96%				
8	Program peningkatan dan kesejahteraan pegawai	140,000,000					135,661,000					97%				
9	Program penetapan dan evaluasi kinerja	350,000,000					338,443,000					97%				
10	Program pendidikan dan pelatihan	200,000,000					164,900,000					82%				
11	Program penataan aset daerah	50,000,000					50,000,000					100%				
12	Program keprotokolian daerah	1,400,000,000					1,400,000,000					100%				
13	Program peningkatan kerjasama antar daerah	200,000,000					179,158,000					90%				
14	Program pelayanan Kerumahtanggaan dan Persandian	670,000,000					663,086,250					99%				
15	Program Koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial		399,988,000					17,156,000				4%				
16	Program Koordinasi Kebijakan Pendidikan dan Olahraga serta Pembinaan Mental Sirtual		2,297,011,600					1,249,883,780				54%				
17	Program Administrasi Umum dan Kerumahtanggaan Daerah		18,388,297,154					14,936,299,642				81%				
18	Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur		249,959,700					-				0%				
19	Program Keprotokolian dan Administrasi Pimpinan Daerah		849,956,896					703,526,671				83%				
20	Program Koordinasi Perekonomian Kota/Kabupaten		2,231,535,180					1,561,828,770				70%				

RENCANA STRATEGIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 2017-2022

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke -					Persentase Realisasi Anggaran				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
21	Program Koordinasi Tata Pemerintahan Kota/Kabupaten		1,964,817,055					1,648,449,890					84%			
22	Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Kota/Kabupaten		2,463,786,356					2,135,882,161					87%			
23	Program Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kota/Kabupaten		2,099,669,615					1,758,185,555					84%			
24	Program Koordinasi Pendidikan dan Mental Spiritual Kota/Kabupaten		199,786,316					199,786,316					100%			
25	Program Koordinasi Prasarana dan Sarana Kota/Kabupaten		1,723,005,650					1,697,204,670					99%			
26	Program Koordinasi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota/Kabupaten		1,639,371,050					1,345,830,550					82%			
27	Program Administrasi Umum dan Keprotokolan Kota/Kabupaten		3,697,431,548					2,247,203,238					61%			
28	Program Penataan dan Pengelolaan Ketatalaksanaan Kota/Kabupaten		2,293,090,658					665,301,618					29%			
29	Program Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan		44,988,213,224					36,198,672,670					80%			
30	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan		74,999,785					-					0%			
31	Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		5,629,981,950					4,956,248,655					88%			
32	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja		149,977,650					133,277,650					89%			
33	Program Pengelolaan dan Penataan Aset Daerah		334,999,598					71,480,890					21%			
34	Program Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah		59,999,920					-					0%			
35	Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah		299,667,960					199,668,460					67%			
36	Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai		229,951,250					212,151,510					92%			
37	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		2,224,000,594					1,243,441,404					56%			
38	Program Peningkatan Sarana, Prasarana Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		600,000,000					65,995,770					11%			
39	Program Peningkatan Kinerja Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		2,199,744,000					2,058,027,000					94%			
40	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor		84,133,722,956					48,296,555,935					57%			
41	Program Pengelolaan Rumah Dinas		921,048,952					178,173,949					19%			
42	Program Pengelolaan Kendaraan Dinas		1,295,433,888					787,089,750					61%			
43	Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur		1,268,507,185					808,562,030					64%			
44	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		630,627,197					528,840,608					84%			
45	Program Peningkatan Kapasitas		745,009,460					406,765,660					55%			

RENCANA STRATEGIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 2017-2022

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke -					Persentase Realisasi Anggaran				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
	Sumber Daya Aparatur															
46	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat SKPD		449,999,900					129,132,270					29%			
47	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD		2,877,136,268					2,573,208,749					89%			
48	Program Sinkronisasi Kebijakan Daerah		194,289,060					159,729,060					82%			
49	Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur			659,598,978					297,827,000				45%			
50	Program Koordinasi Perekonomian Kota/Kabupaten			637,338,312					263,883,068				41%			
51	Program Koordinasi Tata Pemerintahan Kota/Kabupaten			49,286,635,877					31,909,319,073				65%			
52	Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Kota/Kabupaten			824,231,140					442,841,116				54%			
53	Program Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kota/Kabupaten			299,999,616					243,922,000				81%			
54	Program Koordinasi Pendidikan dan Mental Spiritual Kota/Kabupaten			1,378,914,918					490,481,695				36%			
55	Program Koordinasi Prasarana dan Sarana Kota/Kabupaten			298,168,000					74,295,000				25%			
56	Program Koordinasi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota/Kabupaten			587,766,884					247,887,607				42%			
57	Program Administrasi Umum dan Keprotokolan Kota/Kabupaten			6,406,605,808					4,577,333,938				71%			
58	Program Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan			1,499,998,348					-				0%			
59	Program Peningkatan Pengawasan G0Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			1,433,074,307					-				0%			
60	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian. dan Persandian			64,763,572,387					46,816,388,864				72%			
61	Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian. dan Persandian			999,803,339					368,316,504				37%			
62	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat SKPD Urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian. dan Persandian			149,968,000					-				0%			
63	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD Urusan Otonomi			710,750,580					364,758,400				51%			

RENCANA STRATEGIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 2017-2022

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke -					Persentase Realisasi Anggaran				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
	Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian. dan Persandian															
64	Program Koordinasi Perekonomian Kota/Kabupaten				14,950,000				14,950,000							100%
65	Program Koordinasi Tata Pemerintahan Kota/Kabupaten				643,239,653				623,344,500							97%
66	Program Koordinasi Pendidikan dan Mental Spiritual Kota/Kabupaten				121,800,000				116,675,000							96%
67	Program Administrasi Umum dan Keprotokolan Kota/Kabupaten				1,875,376,269				1,423,498,565							76%
68	Program Penataan dan Pengelolaan Ketatalaksanaan Kota/Kabupaten				12,051,200				7,990,400							66%
69	Program Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan				5,207,188,418				4,292,442,626							82%
70	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian. dan Persandian				39,956,259,771				25,415,634,732							64%
71	Program Pengelolaan Rumah Dinas Urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian. dan Persandian				872,204,605				669,337,443							77%
72	Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian. dan Persandian				981,001,236				263,933,980							27%
73	Program Koordinasi Tata Pemerintahan Kota/Kabupaten					613,474,636				561,032,000						91%
74	Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Kota/Kabupaten					130,350,000				29,400,000						23%
75	Program Administrasi Umum dan Keprotokolan Kota/Kabupaten					631,531,507				275,344,500						44%
76	Program Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan					14,148,995,782				10,982,825,000						78%
77	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian. dan Persandian					25,963,016,701				20,390,678,363						79%
78	Program Pengelolaan Rumah Dinas Urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian. dan Persandian					154,462,540				96,128,010						62%
79	Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Otonomi Daerah.					563,277,307				336,590,898						60%

RENCANA STRATEGIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 2017-2022

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke -					Persentase Realisasi Anggaran				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
	Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian															
	JUMLAH	150,570,993,083	189,805,017,575	129,936,426,494	49,684,071,152	42,205,108,473	138,910,583,635	129,173,560,881	86,097,254,265	32,827,807,246	32,671,998,771	92%	68%	66%	66%	77%

Sumber : Bagian Keuangan

2.5 Tantangan dan Peluang Kota Administrasi Jakarta Pusat

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, tantangan dan peluang yang dihadapi Kota Administrasi Jakarta Pusat akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Kota Administrasi Jakarta Pusat menuntut adanya peningkatan peran, kewenangan dan kapasitas Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam menciptakan berbagai kebijakan dan pelayanan yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan pembangunan daerah. Adapun beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayah Jakarta Pusat, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur, antara lain adalah :

2.5.1 Tantangan

2.5.1.1 Laju Urbanisasi

Jakarta masih menjadi tujuan urbanisasi bagi masyarakat di luar Jakarta untuk mencari peluang kehidupan yang lebih baik. Kondisi tersebut terjadi karena 70% perputaran ekonomi ada di Jakarta. Dalam konteks ini Jakarta Pusat turut menjadi tujuan urbanisasi, bilamana tidak ada intervensi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengendalikan laju urbanisasi maka dapat berpotensi menimbulkan peningkatan kawasan kumuh, menambah kemacetan dan menambah pengangguran, sehingga pada akhirnya bermuara pada peningkatan tingkat kerawanan sosial yang menghambat proses pembangunan wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat.

2.5.1.2 Potensi Gangguan Keamanan

Sebagai wilayah administrasi di Ibu Kota Negara, Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat tidak terlepas dari tantangan adanya potensi gangguan keamanan. Dalam konteks ini gangguan keamanan dapat berasal dari gangguan kriminal, dan gangguan

keamanan yang bersifat politis. Salah satu potensi yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan gangguan kriminal adalah masih tingginya tingkat kemiskinan di DKI Jakarta. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik diketahui jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta selama periode September 2015 - Maret 2016 terus mengalami peningkatan. Selama periode September 2015-September 2016 naik 17,17 ribu orang dan Maret 2016-September 2016 naik 1,54 ribu orang. Secara persentase, selama periode tersebut relatif stagnan, walaupun dari September 2015 ke Maret 2016 naik 0,14 poin, sedangkan periode Maret 2016-September 2016 tidak ada perubahan.

Sementara untuk garis kemiskinan selama periode tersebut juga terus meningkat. Selama September 2015-Maret 2016-September 2016, garis kemiskinan naik sebesar 2,02 persen dari Maret 2016-September 2016 (dari Rp 510.359 per kapita per bulan menjadi Rp 520.690 per kapita per bulan), dan naik sebesar 3,51 persen dari September 2015-September 2016 (dari Rp 503.038 per kapita per bulan menjadi Rp 520.690 per kapita per bulan). Lebih lanjut dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.12 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di DKI Jakarta
September 2015 - Maret 2016 - September 2016

Bulan	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)			Jumlah penduduk miskin (000)	Persentase penduduk miskin
	Makanan	Bukan Makanan	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
September 2015	327.678 (65,14%)	175.361 (34,86%)	503.038 (100%)	368,67	3,61
Maret 2016	329.644 (64,59%)	180.715 (35,41%)	510.359 (100%)	384,30	3,75
September 2016	334.938 (64,33%)	185.752 (35,67%)	520.690 (100%)	385,84	3,75

Sumber : Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat

Sedangkan gangguan yang bersifat politis dapat terjadi karena di wilayah Kota Jakarta Pusat terdapat banyak pusat-pusat kegiatan strategis dan asset-asset penting serta sebagian besar kementerian dan lembaga tinggi negara serta kediaman pejabat tinggi negara maupun kediaman perwakilan negara berada di Jakarta Pusat sehingga dapat berpotensi menarik minat kelompok tertentu yang ditunggangi kepentingan politis untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengancam keamanan.

2.6.1.3 Potensi Bencana

Berdasarkan peta bencana Indonesia, terdapat 315 kabupaten/kota yang berada di daerah bahaya banjir dengan jumlah penduduk 61 juta jiwa, dan DKI Jakarta termasuk didalamnya. Dalam konteks Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat persebaran daerah rawan banjir berdasarkan data tahun 2014 meliputi seluruh kecamatan yang ada.

Lebih lanjut, kejadian kebakaran di Jakarta Pusat menunjukkan peningkatan, pada tahun 2013 terjadi 124 kasus kebakaran, kemudian di tahun 2014 terjadi 105 kasus kebakaran, mengalami peningkatan di tahun 2015 menjadi 150 kasus kebakaran. Sedangkan kejadian pohon tumbang di Jakarta Pusat tahun 2015 setidaknya tercatat 3 lokasi pohon tumbang, tahun 2017 terdapat 26 lokasi pohon tumbang dan tahun 2016 setidaknya terdapat 3 lokasi titik pohon tumbang,

Dengan demikian Kota Administrasi Jakarta Pusat perlu mengoptimalkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dan meningkatkan kesiapsiagaan agar sebaran titik banjir dan kejadian pohon tumbang dapat secara perlahan berkurang, serta potensi kebakaran dapat dihindari.

2.6.1.4 Kemacetan

Kemacetan lalu lintas masih menjadi masalah besar transportasi di Jakarta Pusat. Kemacetan membuat biaya transportasi dan biaya persediaan bahan baku meningkat serta dapat menurunkan produktivitas tenaga kerja. Pekerja yang harus menembus kemacetan menuju kantor sudah mengalami kelelahan ketika sampai sehingga tidak mampu bekerja secara optimal. Kondisi demikian dapat bermuara pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi di wilayah Kota Jakarta Pusat. Pada tahun 2017 tercatat terdapat 9 (sembilan) lokasi titik kemacetan di Jakarta Pusat. Salah satu penyebab utama kemacetan antara lain adalah pembangunan infrastruktur belum mampu mengimbangi jumlah kendaraan yang melintas serta masih belum optimalnya pembatasan penggunaan kendaraan. Idealnya 20 persen dari total luas lahan di suatu wilayah seharusnya digunakan untuk infrastruktur transportasi, seperti jalan. Namun, kondisi eksisting total luas jalan di Jakarta masih sangat minim yaitu hanya sekitar 6-7 persen dari total luas lahan.

2.6.2 Peluang

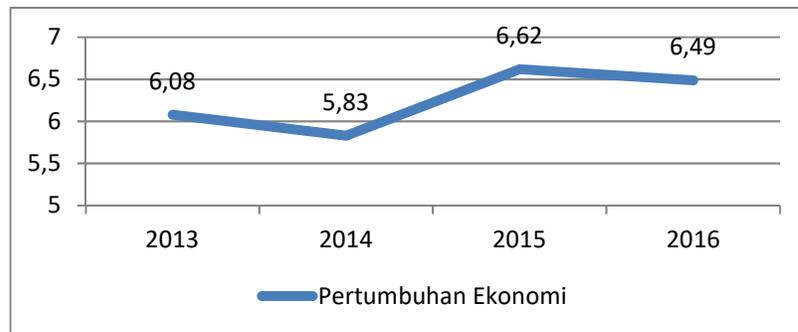
2.6.2.1 Adanya Peraturan Perundangan yang Mendukung Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Pusat

Adanya Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi dasar pelayanan yang dilakukan oleh Kota Administrasi Jakarta Pusat. Lebih lanjut, Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta juga menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Keputusan Gubernur tersebut mengatur berbagai kewenangan yang dilimpahkan dan atau tetap berada di tingkat Provinsi. Dalam hal kewenangan yang dilimpahkan kepada Kota/Kabupaten adalah kewenangan pelayanan publik yang bersifat koordinasi pelaksanaan tugas perangkat di wilayah Jakarta Pusat, pembinaan

kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur.

2.6.2.2 Pusat Kegiatan Ekonomi

Perkembangan perekonomian Jakarta Pusat menjadi salah satu pendorong perekonomian Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut dapat diketahui dari kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta Pusat terhadap total PDRB DKI Jakarta yakni sebesar 24,4 persen pada tahun 2016 atau sebesar 532,943 miliar rupiah dari 2,1 triliun PDRB DKI Jakarta. Lebih lanjut pertumbuhan ekonomi di Jakarta Pusat mengalami peningkatan selama periode 2013-2016. Pada tahun 2013 tercatat 6,08 kemudian meningkat menjadi 6,49 di tahun 2016 (Gambar 2.5).



Gambar 2.5 Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Pusat

Sumber : Bagian Perekonomian Setko Jakarta Pusat

Pertumbuhan ekonomi di Jakarta Pusat diikuti dengan penurunan jumlah pengangguran sejak tahun 2013 hingga 2017. Pada tahun 2013 tercatat sebanyak 47.264 orang menganggur, kemudian menurun menjadi 30.812 di tahun 2017. Kondisi demikian merupakan peluang bagi Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam menjalankan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

2.6.2.3 Partisipasi Masyarakat

Adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan bermakna terdapat kesadaran masyarakat yang cukup tinggi untuk merespon hal-hal terkait pembangunan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Data KPU menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pileg dan Pilpres di Jakarta Pusat sebesar 64% dan 70,2%, sedangkan pada Pilkada 2017 tercatat partisipasi masyarakat Jakarta Pusat mencapai 76,5%.

Sedangkan dalam konteks rembuk RW, Kota Jakarta Pusat memiliki kualitas rembuk RW yang baik, artinya warga memiliki kepedulian untuk berpartisipasi mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan riil yang akan diajukan dalam usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kelurahan tahun 2018. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya penghargaan Rembuk RW Award 2018 oleh enam RW di Jakarta Pusat, yakni RW 07 Kelurahan Rawasari, Cempaka Putih sebagai juara I, RW 03 Kelurahan Bungur, Senen sebagai juara II, RW 09 Kelurahan Harapan Mulya, Kemayoran sebagai juara III, RW 03 Kelurahan Kwitang, Senen sebagai juara Harapan I, RW 03 Kelurahan Galur, Senen sebagai juara Harapan II dan RW 03 Kelurahan Cikini, Menteng sebagai juara Harapan III.

Lebih lanjut, dalam konteks partisipasi masyarakat pada pengelolaan persampahan, tahun 2018 tercatat terdapat 156 bank sampah dengan jumlah nasabah 4.103. Untuk partisipasi masyarakat lainnya, pada tahun 2017 tercatat terdapat 44 titik lokasi gang hijau atau *urban farming* yang menggambarkan kepedulian masyarakat terhadap keindahan dan kelestarian lingkungan.

Adanya kondisi eksisting yang menggambarkan partisipasi masyarakat sebagaimana dijelaskan pada paragraf sebelumnya menunjukkan bahwa Jakarta Pusat memiliki kekuatan berupa modal sosial dalam mewujudkan Jakarta yang *Maju Kotanya, Bahagia Warganya*.

BAB 3

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Perumusan isu-isu strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai perangkat daerah unsur pembantu Gubernur, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kota Administrasi Jakarta Pusat, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan janji Kepala Daerah yang tertuang pada RPJMD Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022 sebagai dasar pelaksanaan tugas Kota Administrasi Jakarta Pusat kedepan, yang selanjutnya tahapan tersebut akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat periode 2017-2022. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Pusat

Sebagaimana Tabel 2.9 tentang pencapaian kinerja Kota Administrasi Jakarta Pusat periode 2011-2017 pada bab sebelumnya, bahwa kinerja Kota Administrasi Jakarta Pusat masih menunjukkan kinerja yang perlu terus dilakukan optimalisasi. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan pelayanan Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah sebagai berikut :

A. Permasalahan Makro Pelayanan Wilayah Kota Administrasi

Dalam kerangka pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, kedudukan Kota Administrasi Jakarta Pusat berbeda dengan wilayah kota lainnya di Indonesia yang memiliki asas otonomi daerah tingkat kota/kabupaten sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun kedudukan Kota

Administrasi Jakarta Pusat dalam kerangka pemerintahan Provinsi DKI Jakarta merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Camat dan Lurah serta mengoordinasikan, memantau dan mengawasi operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Hal tersebut berimplikasi pada terbatasnya kewenangan Walikota beserta perangkatnya yang hanya memiliki fungsi koordinasi, fasilitasi dan administrasi, namun tidak memiliki fungsi teknis dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan lintas urusan yang terus berkembang di wilayahnya. Sementara itu Kota Administrasi Jakarta Pusat berkedudukan sebagai perangkat yang langsung berhadapan dengan persoalan-persoalan warga masyarakat sehingga keterbatasan kewenangan tersebut menjadi akar masalah dalam konteks pelayanan kepada warga masyarakat di Jakarta Pusat. Penjabaran lebih lanjut disampaikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Makro Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kurang responsif dalam menyelesaikan persoalan pelayanan masyarakat yang bersifat lintas urusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya <i>delay time</i> antara aduan masyarakat terhadap suatu persoalan dengan solusi yang diberikan; 2. Rantai koordinasi yang panjang dengan OPD teknis dan kurangnya kewenangan kota administrasi terhadap pelayanan teknis mengakibatkan adanya <i>delay time</i> penyelesaian persoalan yang bersifat teknis dan lintas urusan; 3. Disamping itu, wilayah kota administrasi berfungsi sebagai garda terdepan mendengar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya Kewenangan pelayanan wilayah kota administrasi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	persoalan masyarakat, namun hanya men- <i>delivery</i> persoalan tersebut ke OPD terkait untuk ditindaklanjuti.	

Sumber : FGD Setko Jakarta Pusat (diolah)

B. Permasalahan Pelayanan di Bagian – Bagian Kantor Administrasi Jakarta Pusat

Permasalahan pada bagian ini terkait dengan permasalahan penyelenggaraan pelayanan bagian-bagian di Kota Administrasi Jakarta Pusat serta kecamatan dan kelurahan. Penjabaran lebih rinci disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Identifikasi Permasalahan Bagian Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

No	Bagian	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
1	Bagian Tata Pemerintahan	1. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas bangunan kantor kecamatan, kelurahan dan rumah dinas	1. Melakukan pembangunan dan rehab fasilitas kantor camat, lurah, dan rumah dinas serta fasilitas pendukung lainnya
		2. Masih lemahnya kapasitas lembaga kemasyarakatan	2. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan RT, RW dan LMK, FKDM
		3. Masih perlunya peningkatan kualitas penanggulangan bencana dan penertiban umum	3. Mengoptimalkan koordinasi penanggulangan bencana dan koordinasi penertiban umum
		4. Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan kecamatan dan kelurahan	4. Mengoptimalkan pembinaan dan evaluasi terhadap kecamatan dan kelurahan;
2	Bagian Hukum	1. Belum optimalnya pelayanan pengurusan perkara di pengadilan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat;	1. Mengoptimalkan pelayanan pengurusan perkara di tingkat Kota;
		2. Belum optimalnya pelayanan sengketa pertanahan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat;	2. Mengoptimalkan pelayanan sengketa pertanahan di tingkat kota;
		3. Belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan hak asasi manusia	3. Mengoptimalkan usaha peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia
3	Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan	1. Belum optimalnya pelayanan publik;	1. Mengoptimalkan koordinasi penyelesaian pengaduan masyarakat dan

No	Bagian	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
	n dan Pelayanan Publik	<p>2. Belum optimalnya disiplin aparat;</p> <p>3. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada saat ini, belum seluruhnya mewakili tugas pokok dan fungsi UKPD</p>	<p>mengoptimalkan pengendalian serta evaluasi pelayanan publik.</p> <p>2. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi kinerja pegawai</p> <p>3. Melakukan pembahasan pada tingkat Kota, terhadap tugas pokok dan fungsi UKPD secara keseluruhan, sehingga dapat diketahui secara keseluruhan tugas pokok dan fungsi seluruh UKPD</p>
		<p>4. Perpustakaan yang berada di Ruang Kerja Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Pusat tidak berfungsi optimal (<i>pasif</i>), tidak ada pembaca yang memanfaatkan perpustakaan serta koleksi yang tidak bertambah. Terdapat tugas yang berkaitan dengan perpustakaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat, belum bisa dipahami batasan pengelolaan antara tugas yang ada di Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik dengan yang ada di Bagian Kesejahteraan Rakyat</p>	<p>4. Melakukan pembahasan terkait batasan pengelolaan terkait perpustakaan atau apakah perpustakaan yang ada saat ini perlu diserahkan pengelolaannya kepada Sudin Perpustakaan dan Arsip sesuai bidang tugasnya serta memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang secara khusus di bidang pustaka (<i>pustakawan</i>)</p>
4	Bagian Perekonomian	<p>1. Belum optimalnya pelayanan terhadap UKM, kewirausahaan baru, Pelayanan Ketenagakerjaan, dan stabilitas harga kebutuhan pokok</p>	<p>1. Mengoptimalkan pengendalian dan evaluasi pembentukan kewirausahaan baru pada Kota Adm Jakpus;</p> <p>2. Mengoptimalkan koordinasi dan monitoring harga kebutuhan pokok;</p> <p>3. Mengoptimalkan koordinasi dan monitoring pengembangan UKM;</p> <p>4. Mengoptimalkan koordinasi dan monitoring penempatan tenaga kerja;</p>
5	Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup	<p>1. Belum optimalnya penataan kota dan lingkungan hidup</p>	<p>1. Mengoptimalkan tugas dan fungsi pelayanan lingkungan hidup dan kebersihan;</p> <p>2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan</p>

No	Bagian	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
			dan penanganan kebersihan kota.
6	Bagian Umum dan Protokol	1. Masih perlu ditingkatkannya capaian indeks kepuasan pelayanan keprotokolan	1. Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan keprotokolan dan penyelenggaraan jamuan resmi di Kota Adm Jakpus
7	Bagian Keuangan	1. Masih perlu dioptimalkan pengelolaan aset	1. Mengoptimalkan pengelolaan aset di kecamatan dan kelurahan Kota
		2. Belum optimalnya kualitas pelayanan keuangan	1. Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan terhadap PA/KPA, PPK OPD dan PPTK OPD; 2. Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan bagi bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu 3. Peningkatan Penanganan tindak lanjut pemeriksaan administrasi keuangan; 4. Meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan.
8	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Belum Optimalnya pelayanan terkait penanggulangan kemiskinan, Pelaksanaan Kota sehat, kota layak anak, Pelaksanaan BOP dan BOS, pelaksanaan posyandu, kesehatan, Pemberdayaan perempuan dan masih perlu ditingkatkannya kualitas pelayanan kegiatan keagamaan tingkat kota dan kegiatan olahraga rakyat	1. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan Kemiskinan, Kota Sehat, Kota Layak Anak, Pelaksanaan BOP dan BOS; 2. Mengoptimalkan Pembinaan Pemberdayaan perempuan; 3. Mengoptimalkan koordinasi bidang kesehatan; 4. Mengoptimalkan pelaksanaan PSN; 5. Mengoptimalkan pelayanan Keagamaan (MTQ); 6. Mengoptimalkan kegiatan olahraga rakyat.
9	Kecamatan	Masih perlu optimalisasi teknis pelaksanaan musrenbang, optimalisasi kualitas FKDM, kegiatan keolahragaan masyarakat, keamanan dan ketertiban,	1. Mengoptimalkan pelaksanaan musrenbang kecamatan; 2. Mengoptimalkan kinerja FKDM; 3. Mengoptimalkan 4. Mengoptimalkan pelayanan keamanan dan ketertiban; Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan keolahragaan tingkat Kabupaten
10	Kelurahan	Masih perlu ditingkatkan kualitas pelayanan keamanan dan	1. Mengoptimalkan peningkatan peran kelembagaan RT,RW,

No	Bagian	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		ketertiban, peningkatan peran RT,RW,LMK, peningkatan kewaspadaan dini masyarakat tingkat kelurahan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan, pelayanan kesehatan (posyandu, DBD) dan peningkatan kinerja PPSU	LMK; 2. Mengoptimalkan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat; 3. Mengoptimalkan koordinasi dan pembinaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan; 4. Mengoptimalkan koordinasi pelayanan kesehatan; Mengoptimalkan penanganan prasarana sarana umum.

Sumber : FGD Bagian-Bagian Setko Jakarta Pusat, Kelurahan dan Kecamatan (diolah)

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen masyarakat. Sesuai dengan arahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022 bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mewujudkan Visi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

“Jakarta Kota Maju, Lestari dan Berbudaya yang Warganya Terlibat Dalam Mewujudkan Keberadaban dan Kesejahteraan Bagi Semua”

Adapun penjelasan Visi dijabarkan sebagai berikut :

Keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga Jakarta menjadi fondasi penting dalam pembangunan. Tidak hanya pembangunan fisik seperti infrastruktur yang megah serta penggunaan teknologi modern dalam kehidupan sehari-hari,

namun juga pembangunan manusia yang mencakup segala upaya perubahan positif untuk memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, rasa aman, kesejahteraan, dan kebahagiaan semua warga. Pendekatan pembangunan fisik dan manusia ini harus dilingkupi dengan pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan, kebudayaan serta keterlibatan masyarakat. Tidak hanya sekedar berpartisipasi, masyarakat menjadi motor penggerak utama pembangunan yang ikut menentukan arah gerak pembangunan Jakarta ke depan.

Jakarta : meliputi wilayah dan seluruh isinya, yakni Provinsi DKI Jakarta dengan lima kota administrasi dan satu kabupaten administrasi, serta seluruh warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya didirikan tahun 1961 hingga sekarang.

Maju : memiliki arti menjadi lebih baik atau berkembang. Hal ini menunjukkan adanya progres untuk mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat.

Lestari : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata “lestari” adalah tetap seperti keadaan semula, tidak berubah, bertahan dan kekal. Para ahli ekologi telah menganjurkan pergeseran dari pembangunan yang ramah lingkungan (dampak negatif sekecil mungkin atau nol), menjadi memulihkan lingkungan, sebab bukan hanya mengurangi kerusakan yang merupakan dampak dari pembangunan, tapi juga perlunya memperbaiki lingkungan untuk mencapai kembali keadaan kapasitasnya seperti semula.

Berbudaya : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari “berbudaya” adalah mempunyai budaya, mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Menurut *World Cities Culture Report 2015* sebuah kota layak disebut sebagai kota budaya jika fasilitas kebudayaan dianggap sama penting dengan fasilitas keuangan atau perdagangan. Kebudayaan dalam segala bentuknya adalah kunci yang membuat sebuah kota menjadi menarik bagi orang-orang yang terdidik, dan karenanya kebudayaan itu menjadi bisnis yang membuka lapangan kerja. Budaya akan memberi keunggulan dalam dunia yang semakin global dan membantu warganya untuk tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang.

Keberadaban : keberadaban berasal dari kata dasar “adab”, dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tersebut memiliki arti kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan dan ahlak. Hal ini berarti Kota Jakarta dalam pembangunannya bukan menyengsarakan, namun berupaya untuk menyejahterakan rakyat. Selain itu pemerintah wajib berpihak pada kepentingan rakyat miskin yang bukan objek dari pembangunan melainkan subjek dari pembangunan dan turut serta dalam pembangunan.

Keadilan : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata “keadilan” adalah sifat (perbuatan, perlakuan dan sebagainya) yang adil. Berdasarkan sosial, keadilan merupakan kerja sama untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organis, sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan aslinya.

Kesejahteraan : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “kesejahteraan” adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketentraman. Sedangkan dalam substansi sosial kata “kesejahteraan” merupakan keadaan sejahtera masyarakat.

3.2.2 Misi

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah dalam mewujudkan visi yang telah dijabarkan sebelumnya. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah dijabarkan, akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan;
2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi, serta perbaikan pengelolaan tata ruang;
3. Menjadikan Jakarta Tempat Wahana Aparatur Negara Yang Berkarya, Mengabdikan, Melayani, Serta Menyelesaikan Berbagai Permasalahan Kota Dan Warga Secara Efektif Meritokratis, Dan Berintegritas;
4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial;
5. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

Visi dan Misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 selanjutnya menjadi pedoman Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat 2017-2022 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat 2017-2022 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022. Adapun

dalam misi tersebut, Kota Administrasi Jakarta Pusat mengemban misi nomor 3 yakni **“Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif meritokratis, dan berintegritas”**. Untuk mengetahui hambatan dan faktor penentu keberhasilan Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam mewujudkan Misi RPJMD, diuraikan dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam Mewujudkan Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2022

No.	Misi RPJMD (Misi Kepala Daerah) yang Terkait Peran Kota Administrasi Jakarta Pusat	Hambatan Kota Administrasi Jakarta Pusat Dalam Mewujudkan Misi RPJMD	Faktor Penentu Keberhasilan Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam Mewujudkan Misi RPJMD
1	Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif meritokratis, dan berintegritas”	3. Masih perlu mengoptimalkan pembentukan aparatur yang disiplin, profesional dan berintegritas;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil-hasil evaluasi kinerja pegawai dan kinerja organisasi; 2. Mengoptimalkan pola karir pegawai serta meningkatkan kualitas pegawai fungsional maupun struktural

3.2.3 Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur

Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur yang dimandatkan oleh warga Jakarta merupakan unsur pokok dalam menyusun program dan kegiatan pada RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022. Adapun 23 janji kerja dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Merevisi dan memperluas manfaat Kartu Jakarta Pintar dalam bentuk Kartu Jakarta Pintar Plus untuk semua anak usia sekolah (6-21 tahun), yang juga dapat digunakan untuk kelompok belajar Paket A, B, C, pendidikan madrasah, pondok pesantren dan kursus keterampilan serta dilengkapi dengan bantuan

- tunai untuk keluarga tidak mampu;
2. Merevisi dan memperluas manfaat Kartu Jakarta Sehat dalam bentuk Kartu Jakarta Sehat Plus dengan menambahkan fasilitas khusus untuk para guru mengaji, pengajar sekolah minggu, penjaga rumah ibadah, khatib, penceramah dan pemuka agama;
 3. Membuka 200.000 lapangan kerja baru, membangun dan mengaktifkan 44 pos pengembangan kewirausahaan warga untuk menghasilkan 200.000 pewirausaha baru;
 4. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan dengan mengintegrasikan dunia usaha ke dalamnya, untuk menghasilkan lulusan yang langsung terserap ke dunia kerja dan berwirausaha;
 5. Mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok dengan menjaga ketersediaan bahan baku dan menyederhanakan rantai distribusi, menyediakan Kartu Pangan Jakarta untuk meningkatkan daya beli warga tidak mampu, serta merevitalisasi pasar-pasar tradisional dan pedagang Kaki Lima untuk meningkatkan kesejahteraan para pedagang;
 6. Menghentikan Reklamasi Teluk Jakarta untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap nelayan, masyarakat pesisir dan segenap warga Jakarta;
 7. Membangun pemerintahan yang bersih, modern, melayani berbasis transparansi, akuntabilitas, dan keteladanan dengan mengoptimalkan pelibatan publik dan pemanfaatan teknologi (*Smart City*);
 8. Mengembangkan kinerja dan tata kelola pemerintahan untuk merealisasikan rencana kerja hingga 95%, mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam audit laporan keuangan, mencapai predikat 80 dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menghentikan praktik

- penyelewengan di dalam birokrasi, dan memperbaiki manajemen aset-aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
9. Meningkatkan Realisasi Rencana Program (daya serap anggaran) untuk memperluas cakupan dan efektivitas program-program penanggulangan banjir dan kemacetan, rehabilitasi dan pemeliharaan lingkungan hidup serta pengelolaan sampah;
 10. Memuliakan perempuan Jakarta dengan mendukung Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif, melakukan pendataan dan pemantauan dini terhadap ibu-ibu hamil dan balita yang memerlukan bantuan khusus, memberikan cuti khusus bagi suami selama proses kelahiran anak, serta menyediakan fasilitas-fasilitas publik seperti Ruang Menyusui dan Tempat Penitipan Anak yang dikelola secara sehat, profesional dan bisa diakses seluruh warga;
 11. Memberdayakan perempuan Jakarta dengan mendukung sepenuhnya partisipasi perempuan dalam perekonomian, antara lain melalui pemberian Kredit Usaha Perempuan Mandiri;
 12. Melindungi perempuan dan anak-anak Jakarta dari praktik pelecehan, kekerasan dan diskriminasi serta praktik perdagangan manusia (*human trafficking*), dengan mengaktifkan 267 Rumah Aman, merevitalisasi Unit Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan berbasis aplikasi bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Jakarta, dan memberi subsidi bantuan hukum bagi korban;
 13. Membangun sistem transportasi umum yang terintegrasi dalam bentuk interkoneksi antarmoda, perbaikan model manajemen layanan transportasi umum, perluasan daya jangkau transportasi hingga menjangkau seluruh warga, pengintegrasian sistem transportasi umum dengan pusat-pusat pemukiman, pusat aktivitas publik, dan moda transportasi publik dari luar Jakarta;
 14. Mengatasi kesenjangan Ibu Kota dengan menjadikan Kepulauan Seribu sebagai

Kepulauan Pembangunan Mandiri, dengan menyediakan infrastruktur, lapangan kerja, fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi segenap warganya dan menjadikan sebagai pusat inovasi konservasi ekologi;

15. Mengaktifkan kembali komunitas-komunitas di Jakarta melalui kegiatan pengembangan kebudayaan, kesenian, olahraga, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan budaya membaca melalui Program Taman Maju Bersama, yaitu merevitalisasi taman-taman yang ada, membangun taman-taman baru dari wilayah pinggiran Jakarta, serta membangun Taman Pintar (*Science Park*);
16. Membangun dan merevitalisasi pusat-pusat pengembangan kebudayaan, antara lain dengan membangun Taman Benyamin Sueb, menyelamatkan dan merevitalisasi Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, menjadikan Jakarta sebagai pusat kebangkitan Film Nasional;
17. Menyelenggarakan festival olahraga dan kesenian Jakarta sepanjang tahun untuk mengembangkan pembinaan olahraga dan kesenian berbasis komunitas;
18. Menjadikan Jakarta sebagai Kota Hijau dan Kota Aman yang ramah, sejuk dan aman bagi anak, perempuan, pejalan kaki, pengguna jalan, dan seluruh warga, menggalakkan kegiatan cocok tanam kota (*urban farming*); melakukan audit berkala keamanan kampung, serta memperluas cakupan dan memperbaiki kesejahteraan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU);
19. Memperluas cakupan dan memperbaiki kualitas layanan air bersih dengan prioritas pada wilayah-wilayah dengan kualitas air terburuk, dan memberikan subsidi langsung untuk warga tidak mampu;
20. Merevitalisasi layanan dokter komunitas, melakukan pelatihan peduli kesehatan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar, melakukan pelatihan peduli lingkungan hidup, dan mengaktifkan Pos Perempuan Mandiri sebagai

bagian dari program pengembangan Posyandu dan Posbinidu;

21. Memberdayakan para pengembang kelas menengah untuk merealisasikan pembangunan kampung susun, kampung deret dan rumah susun, serta mempermudah akses kepemilikan bagi warga tidak mampu;
22. Membangun pusat-pusat pariwisata, tempat-tempat bersejarah dan pusat-pusat kegiatan warga sebagai tempat yang ramah, aman dan sejuk bagi anak, lansia dan disabilitas;
23. Meningkatkan bantuan sosial untuk rumah ibadah, lembaga pendidikan keagamaan, lembaga sosial, sekolah minggu dan Majelis Taklim berbasis asas proporsionalitas dan keadilan.

3.3 Arah Kebijakan Kewilayahan Jakarta Pusat Berdasarkan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022

Sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, arah kebijakan pengembangan kawasan di wilayah Jakarta Pusat meliputi Penataan Kawasan Johar Baru, Senen, Pasar Baru dan Kawasan Tanah Abang. Dalam konteks ini sesuai dengan tugas dan fungsinya Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama perangkatnya bertugas untuk *mengoordinasikan* pelaksanaan pengembangan kawasan tersebut bersama *stakeholder* terkait. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai penataan Kawasan Johar Baru, Senen, Pasar Baru dan Kawasan Tanah Abang sebagaimana tertera pada RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 dijelaskan sebagai berikut :

A. Penataan Kawasan Johar Baru

Kawasan Johar Baru merupakan wilayah kecamatan dengan luas 2,38 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 117.985 jiwa (tahun 2015). Pemanfaatan lahan di

wilayah Kecamatan Johar Baru lebih banyak didominasi oleh pemukiman padat, selain itu tersedia beberapa fasilitas umum yaitu gelanggang remaja, sekolah dan pasar.

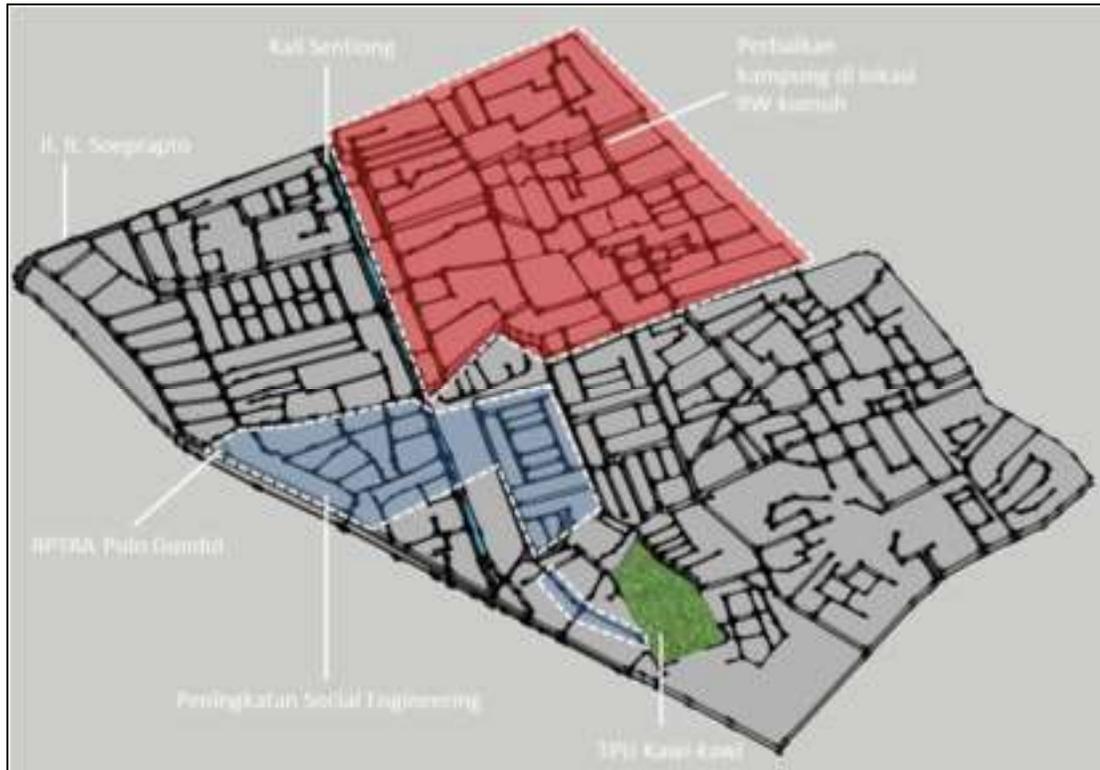
Kepadatan penduduk Johar Baru sebesar 48.890 jiwa/Km² (tahun 2015) menyebabkan terbatasnya jumlah ruang publik/ruang terbuka hijau dan kualitas permukiman baik dari segi fisik bangunan, akses serta sanitasi menjadi buruk. Hal ini semakin menambah masalah kerawanan sosial seperti rawan peredaran narkoba dan tawuran antar warga. Disamping itu, sebagian wilayah di Kawasan Johar Baru merupakan kawasan rawan banjir/genangan.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2030, Kawasan Johar Baru diarahkan pengembangannya sebagai rencana pengembangan kawasan campuran dengan perbaikan lingkungan kawasan campuran dan disertai dengan penyediaan infrastruktur yang memadai. Selain itu, pembangunan Johar Baru juga diarahkan untuk membentuk masyarakat yang mempunyai kohesivitas dan lebih toleran, kreatif dan berkembang.

Rencana pengembangan dan penataan Kawasan Johar Baru diarahkan pada :

- Pembangunan dan pemeliharaan taman interaktif dan ruang publik terbuka ramah anak;
- Peningkatan dan pemeliharaan jalan serta jalan lingkungan/orang;
- Peningkatan dan pemeliharaan sistem drainase;
- Penataan kampung di lokasi RW kumuh;
- Pemeliharaan taman dan jalur hijau;
- Peningkatan *social engineering*;
- Pembentukan karakter *building*;
- Pengembangan kelompok usaha baru/wirausaha baru;

- Pemberdayaan masyarakat dengan pola pendekatan kultural, struktural dan prosesual;
- Sinkronisasi dan integrasi program dan kegiatan oleh seluruh stakeholder.



Gambar 3.1 Penataan Kawasan Johar Baru

Sumber : Subanppeko Jakarta Pusat 2018

B. Pengembangan Kawasan Senen

Kawasan Senen saat ini masih menjadi salah satu pusat perdagangan di Jakarta. Stasiun Pasar Senen merupakan Stasiun Kereta Api yang melayani rute antar kota utama di Pulau Jawa maupun rute komuter. Jumlah pengunjung per hari yang dilayani mencapai 19.000 orang, sedangkan pada musim mudik lebaran dapat meningkat menjadi 25.000 orang per hari. Fasilitas publik lainnya yaitu adanya terminal Pasar Senen yang merupakan terminal antara yang melayani rute-rute

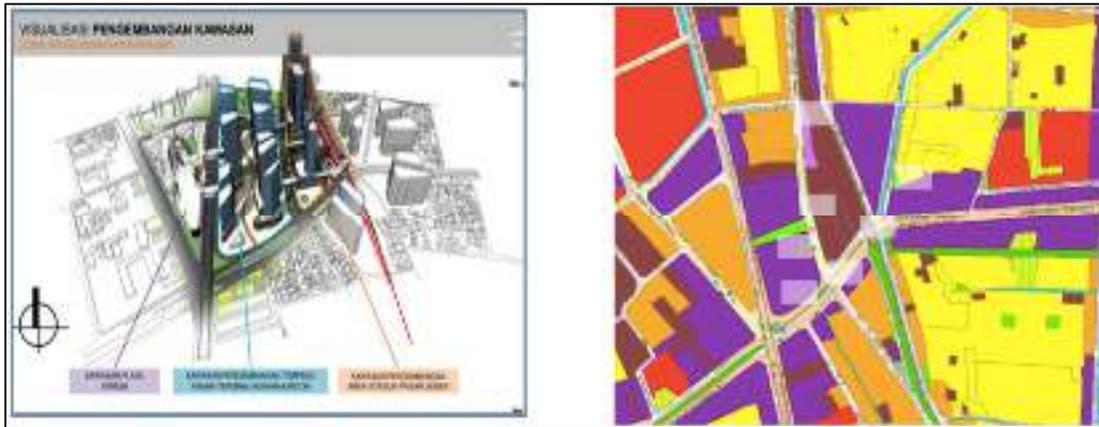
angkutan umum dalam kota dan rute Jabodetabek. Di kawasan ini juga terdapat pusat pertokoan yang modern serta berderet beberapa bangunan apartemen.

Utuk pusat perbelanjaan terdapat proyek Pasar Senen dimana aktivitasnya sama seperti di pasar tradisional karena masih terdapat proses tawar menawar harga antara penjual dan pembeli. Permasalahan di Kawasan Pasar Senen yaitu terdapat sekitar 396 pedagang kaki lima (PKL) dan masih banyak PKL yang berjualan tidak pada tempatnya atau berjualan di trotoar dan bahu jalan. Penataan atau relokasi PKL masih terkendala dengan ketersediaan kios serta kemampuan PKL untuk memenuhi kewajibannya. Jumlah tempat usaha di Pasar Senen yang dikelola PD. Pasar Jaya mencapai 7.000 an dan belum dapat menampung PKL lainnya. Belum terbitnya parkir kendaraan di kawasan ini juga turut menyumbang kemacetan, dan kepadatan lalu lintas makin bertambah setelah ditutupnya lintasan sebidang perlintasan rel kereta api. Hal ini menyebabkan kapasitas jalan menjadi mengecil dan berdampak pada semakin padatnya kendaraan di kawasan Senen. Selain itu, penutupan lintasan sebidang ini juga berpengaruh pada pergerakan warga di sekitar kawasan tersebut serta berpotensi menurunkan omset penjualan lokbin poncol dan pedagang lainnya.

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2030 Provinsi DKI Jakarta. Kawasan Senen ditetapkan sebagai sistem pusat kegiatan sekunder. Kawasan ini adalah pusat kawasan perdagangan dan jasa dengan stasiun terpadu dan titik perpindahan beberapa moda transportasi dengan konsep Transit Oriented Development (TOD). Kawasan Senen menjadi pusat kegiatan sekunder yang memiliki berbagai fungsi seperti stasiun, terminal, pusat perbelanjaan, gelanggang remaja dan hunian.

Untuk mengatasi permasalahan di kawasan ini terdapat beberapa solusi untuk mendukung Pemerintah Provinsi dalam mengembangkan kawasan Pasar Senen yang diarahkan menjadi pusat kawasan perdagangan dan jasa serta stasiun terpadu dan titik perpindahan beberapa moda transportasi dengan konsep TOD, yaitu dengan :

- Melakukan penataan dan relokasi pedagang kaki lima di beberapa titik/jalur perpindahan penumpang, termasuk pembinaan PKL;
- Perbaiki infrastruktur kota untuk mendukung konsep TOD, antara lain penataan trotoar yang saling menghubungkan antar moda;
- Melakukan penataan taman dan ruang terbuka hijau;
- Pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk penyebrangan yang menghubungkan fasilitas perpindahan angkutan umum massal ke pusat-pusat kegiatan;
- Pengendalian arus orang atau warga agar semakin mudah untuk mengakses menuju lokasi binaan atau penampungan PKL, pusat-pusat perbelanjaan atau fasilitas publik lainnya;
- Pembangunan/Peningkatan kualitas pencahayaan kota;
- Pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan termasuk pengendalian parkir liar;
- Pemasangan rambu dan marka jalan;
- Peningkatan saluran air.



Gambar 3.2 Pengembangan Kawasan Senen

Sumber : Subanppeko Jakarta Pusat, 2018

C. Penataan Kawasan Pasar Baru

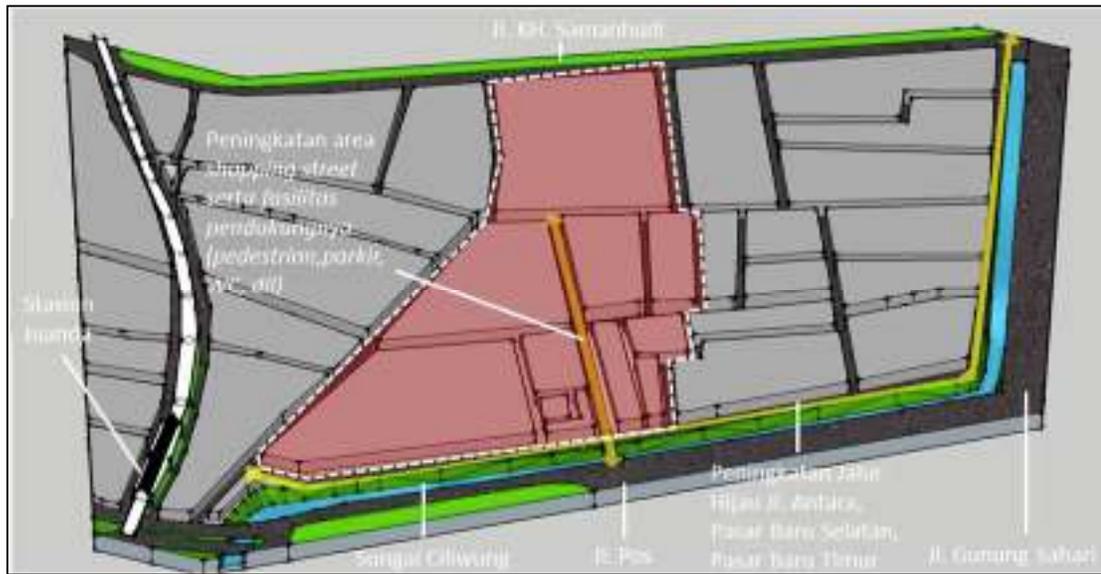
Kawasan Pasar Baru telah dikenal sebagai tempat perbelanjaan elit bagi orang-orang di Batavia sejak zaman kolonial Belanda. Secara umum, Kawasan Pasar Baru dibagi menjadi enam area utama, yakni Metro Pasar baru, Metro Atom atau Pasar Atom, Harco Pasar baru, Pasar Baru, Istana Pasar Baru dan Jalan Pintu Air.

Seiring berjalannya waktu, popularitas Kawasan Pasar Baru sebagai tempat perbelanjaan elit semakin menurun. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya pusat-pusat perbelanjaan baru yang lebih modern seperti mall dan supermarket di Jakarta dan sekitarnya. Untuk melindungi pasar yang penuh nilai sejarah ini, pada tahun 2000 Pemerintah DKI Jakarta menetapkan Pasar baru dan kawasan sekitarnya sebagai kawasan belanja bertaraf internasional melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 3048 tahun 2000. Adapun dalam RTRW Provinsi DKI Jakarta 2030, Kawasan Pasar Baru ditetapkan sebagai pusat kegiatan perdagangan skala kota atau pusat kegiatan tersier (pusat perdagangan dan jasa).

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2030 Provinsi DKI Jakarta, Kawasan Pasar Baru ditetapkan sebagai pusat kegiatan tersier, atau pusat kegiatan perdagangan skala kota untuk mengembangkan dan mengembalikan popularitas pasar baru sebagai pusat wisata belanja dan kuliner.

Untuk mendukung pusat kegiatan tersier dan mengatasi potensi permasalahan di Kawasan Pasar Baru, terdapat beberapa solusi untuk 5 (lima) tahun kedepan, yaitu:

- Perbaiki infrastruktur kota untuk mendukung fungsi sebagai kawasan kegiatan perdagangan skala kota atau wisata belanja;
- Menata dan mengoptimalkan area parkir yang tersedia;
- Peningkatan jalur pedestrian di dalam Kawasan Pasar Baru;
- Peningkatan Jalur Hijau Jalan Pintu Air, Jalan Antara, Jalan Pasar Baru Selatan dan Jalan Pasar Baru Timur untuk mendukung konsep *water front city*;
- Melakukan pengendalian ketertiban dan kenyamanan di sepanjang kawasan;
- Melakukan penataan PKL dan mengantisipasi munculnya PKL baru/liar di dalam kawasan Pasar Baru;
- Penyelenggaraan Festival-Festival;
- Peningkatan penatacahayaan jembatan, trotoar/pedestrian, penghijauan dan taman;
- Peningkatan koordinasi, fungsi dan pelibatan asosiasi/komunitas Pasar Baru dalam penataan Kawasan.



Gambar 3.3 Penataan Kawasan Pasar Baru

Sumber : Subanpekko Jakarta Pusat, 2018

D. Pengembangan Kawasan Tanah Abang

Kawasan Tanah Abang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Tanah Abang yang mempunyai luas wilayah sebesar 9,3 Km² dan jumlah penduduk 181.135 jiwa (2017). Awal mula kawasan Tanah Abang berupa pasar yang dikhususkan untuk berjualan tekstil dan barang kelontong serta dibuka hanya pada hari sabtu.

Seiring berjalannya waktu, pasar Tanah Abang semakin berkembang, bangunan pasar yang awal mula berdiri hanya menggunakan konstruksi sederhana berbahan bambu, kini telah berubah menjadi bangunan tinggi yang berlantai banyak dan terbagi kedalam beberapa blok, dari blok A sampai dengan blok G. Disamping itu terdapat pula aktivitas perdagangan khusus hari senin dan Kamis (pasar Tasik) sejumlah 1.200 pedagang di 3 (tiga) lokasi yaitu di lokasi bongkaran Tanah Abang, atau areal parkir Masjid Said Naum dan sisi timur Jl. Jatibaru.

Kawasan Tanah Abang merupakan salah satu kawasan strategis yang dimiliki DKI Jakarta saat ini, namun demikian disisi lain kondisi dan kualitas lingkungan di kawasan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kota Jakarta saat ini. Untuk itu diperlukan perbaikan kondisi dan kualitas lingkungan di kawasan tersebut. Hal ini mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 41 Tahun 2014 yang menugaskan PD. Pembangunan Sarana Jaya untuk dapat melaksanakan pengembangan Kawasan Sentra Primer Tanah Abang.

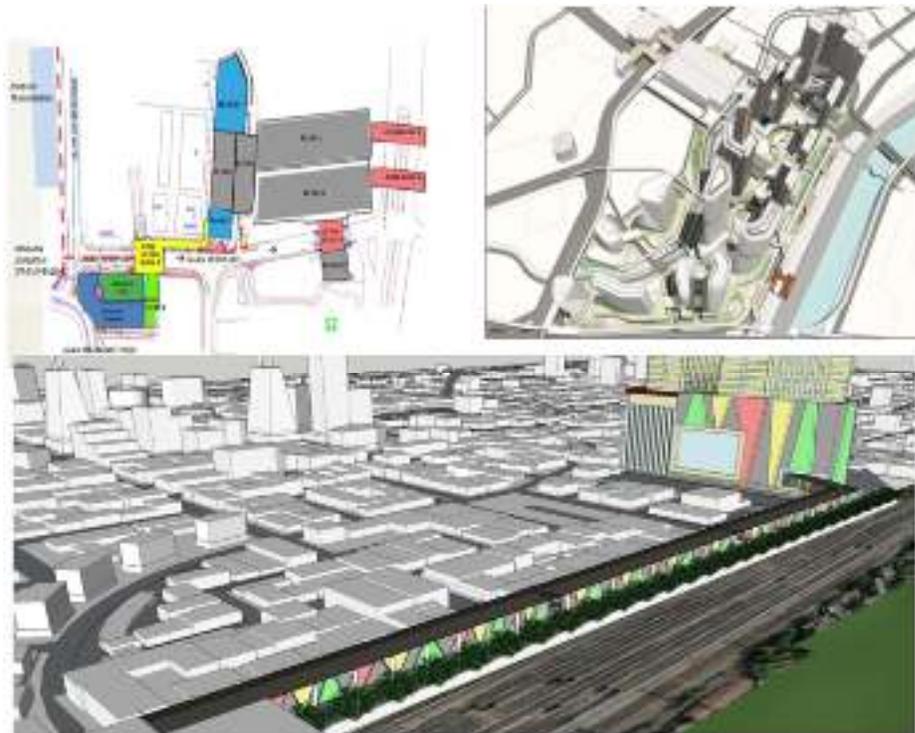
Permasalahan di Kawasan Tanah Abang adalah banyaknya pedagang kaki lima (PKL), kemacetan lalu lintas di Kawasan Tanah Abang, kurangnya lahan untuk parkir kendaraan maupun aktivitas bongkar muat barang, serta tidak tertibnya perilaku pengguna KRL yang rata-rata per hari mencapai 120.000 orang keluar-masuk area Stasiun Tanah Abang maupun berpindah moda transportasi di sekitar area stasiun.

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030 Provinsi DKI Jakarta, Kawasan Tanah Abang diarahkan sebagai kawasan pusat kegiatan primer. Definisi kawasan pusat kegiatan primer dalam RTRW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala nasional atau beberapa provinsi dan internasional.

Untuk jangka pendek telah dilakukan penataan PKL di Jl. Jatibaru sebanyak 372 PKL dan penataan ojek didalam area Stasiun Tanah Abang untuk mempermudah perpindahan moda, sedangkan untuk 5 (lima) tahun kedepan diperlukan beberapa solusi, antara lain:

- Revitalisasi Pasar Blok G, dan pembangunan *Sky Bridge* maupun jembatan penyebrangan orang menuju Stasiun Tanah Abang atau ke titik pemberhentian antar moda transportasi. ☐

- Pembangunan *fly over*/ jalan tembus di Kali Inspeksi Kanal banjir Barat untuk menghindari perlintasan sebidang rel kereta api menuju Jl. Tenaga Listrik/Jl. Jati Pinggir ☐
- Pembangunan *Transit Oriented Development* (TOD) antara lain dalam bentuk integrasi dengan stasiun KRL dan rencana titik pemberhentian serta interkoneksi antar moda sarana angkutan umum masal yang diwujudkan melalui sistem pergerakan pedestrian terpadu ☐
- Peningkatan jalan dan rekayasa lalu lintas ☐
- Revitalisasi Pasar Lontar Jl. H. Sabeni sebagai kawasan *mixed use* sekaligus revitalisasi ☐ Pasar Kambing dengan pengelolaan limbah IPAL yang terintegrasi
- Pengembangan kawasan strategis yang memwadahi kegiatan komersial (perkantoran, perdagangan, pergudangan, hotel, dll), hunian vertikal, ruang terbuka hijau, dan ruang terbuka publik.



Gambar 3.4 Penataan Kawasan Tanah Abang

Sumber : PD Pasar Jaya 2018

3.4 Isu-isu Strategis

Berdasarkan Gambar 3.5 Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan tahap identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kota Administrasi Jakarta Pusat, telaahan visi, misi, dan janji Gubernur dan Wakil Gubernur serta telaah arah kebijakan kewilayahan dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022.



Gambar 3.5 Struktur Pembentuk Isu-Isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat

Lebih lanjut disintesis beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis pada Tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4 Isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat

No	Aspek	Permasalahan	Isu-Isu Strategis
1	Peningkatan kapasitas Lembaga RT, RW dan LMK, FKDM	Masih perlu dioptimalkan pemberdayaan, pengawasan, pembinaan lembaga RT, RW, dan LMK, FKDM	1. Peningkatan kualitas pelayanan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2	Pengembangan Kewilayahan	Masih perlu dioptimalkan sarana dan prasarana kewilayahan dalam menunjang pelayanan prima kepada masyarakat	
3	Peningkatan partisipasi masyarakat	Masih perlu dioptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, pemeliharaan dan penanganan kebersihan lingkungan,	2. Peningkatan kualitas pemberdayaan, pembinaan masyarakat dan penataan pratana sosial;
4	Pemberdayaan masyarakat	Masih perlu dioptimalkan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya; Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan Pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan penyelenggaraan kegiatan Keolahragaan masyarakat	
5	Ekonomi masyarakat	Masih perlu dioptimalkan pengembangan peluang usaha ekonomi dan pengawasan/pengembangan aktifitas ekonomi.	
6	Penanganan Bencana	Masih perlu dioptimalkan penanganan dan koordinasi kebencanaan (baik bencana alam maupun bencana sosial)	3. Mengoptimalkan fungsi koordinasi lintas bidang urusan bersama seluruh stakeholder Kota Administrasi Jakarta Pusat;
7	Penataan Kawasan	Masih perlu dioptimalkan koordinasi bersama seluruh mitra kerja terkait penataan kawasan	

Dari tabel di atas dapat dijelaskan secara singkat masing-masing isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Peningkatan kualitas pemberdayaan, pembinaan masyarakat dan penataan pratana sosial;

3. Mengoptimalkan fungsi koordinasi lintas bidang urusan bersama seluruh *stakeholder* Kota Administrasi Jakarta Pusat;

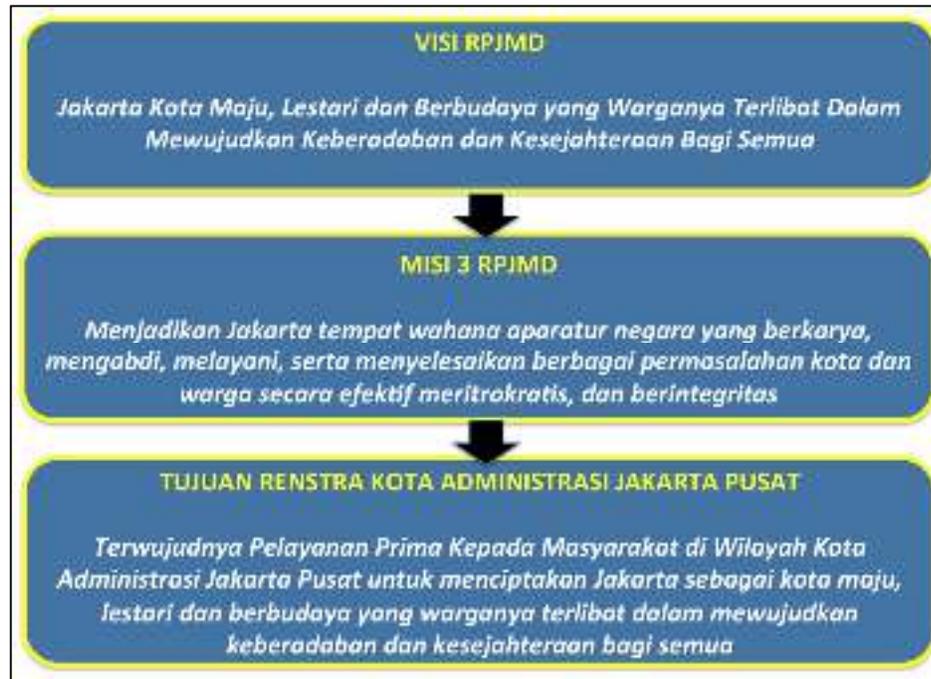
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022, Kota Administrasi Jakarta Pusat perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Adapun tujuan dari Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah :

“Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk menciptakan Jakarta sebagai kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua”

Adapun keterkaitan tujuan Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan Visi Misi RPJMD diilustrasikan dalam skema di bawah ini.



Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat di Wilayah Administrasi Jakarta Pusat untuk menciptakan Jakarta sebagai kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Pusat	Persentase Terlaksananya Tugas Dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Pusat > 80 %	100	100	100	100	100
			Persentase Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan	100	100	100	100	100
			Persentase Peningkatan Kesadaran Hukum Dan Hak Asasi Manusia	-	88	90	91	91
			Persentase Capaian Kinerja Walikota (Kpi, Perkin Dan Lakip)	-	100	100	100	100
			Jumlah Kawasan Yang Tertata	-	4	4	4	4
			Persentase Jumlah Wirausaha Baru Yang Tercapai	100	100	100	100	100
			Koordinasi Pelaksanaan Kota Sehat	-	100	100	100	100
			Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota	-	100	100	100	100
		Koordinasi Pelaksanaan Kota Layak Anak	-	100	100	100	100	
Tersedianya sarana dan prasarana serta	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan	-	4	4	4	4		

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	kesejahteraan bagi semua	perlengkapannya sesuai standar yang mendukung pelayanan pengembangan kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Dan Kota Administrasi Jakarta Pusat					
			Jumlah Kantor Camat dan Lurah/Rumah Dinas Camat dan Lurah Dan Sarana Perlengkapannya Yang Memenuhi Standar	-	75	80	85	89
		Tersedianya pelayanan perkantoran Kota Administrasi Jakarta Pusat yang berkualitas untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Layanan Kantor	4	4	4	4	4
			Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	-	4	4	4	4
		Meningkatnya kualitas pengelolaan kendaraan operasional Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Pelayanan Kendaraan Operasional	4	4	4	4	4
			Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	-	100	100	100	100
		Mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan, kelurahan dan kota Administrasi Jakarta Pusat	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	-	92	94	96	98

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Kota Administrasi Jakarta Pusat. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Kota Administrasi Jakarta Pusat harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Kota Administrasi Jakarta Pusat periode 2017-2022 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan teknik analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Analisa SWOT Atas Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal

Peluang (O) :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Peraturan Perundangan yang Mendukung Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Pusat; 2. Pusat Kegiatan Ekonomi; 3. Partisipasi Masyarakat 	Tantangan (T): <ol style="list-style-type: none"> a. Laju Urbanisasi; b. Potensi Gangguan Keamanan; c. Potensi Bencana; d. Kemacetan.
Kekuatan (S): <ol style="list-style-type: none"> a. Sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa; b. Adanya Komitmen Pimpinan; c. Adanya sumberdaya manusia yang mumpuni dan sarana prasarana yang menunjang pelayanan; d. Memiliki informasi terpadu 	Alternatif Strategi (S-O): <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan dan mengembangkan disiplin serta profesionalisme dengan mengedepankan transparansi dalam pelayanan publik;² b. Menyediakan informasi untuk masyarakat dan kemudahan akses untuk mendapatkannya; 	Alternatif Strategi (S-T): <ol style="list-style-type: none"> a. Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan pelayanan publik; b. Meningkatkan pembinaan, penataan dan pembangunan pranata sosial dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam proses

<p>pelayanan</p>	<p>c. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pembentukan wirausaha baru; d. Melakukan pembinaan, pengawasan pembentukan wirausaha baru dan melakukan evaluasi demi tercapainya peningkatan jumlah wirausaha baru; e. Meningkatkan kualitas pelayanan perkantoran untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat; f. Meningkatkan kualitas pengelolaan kendaraan operasional dalam</p>	<p>pembangunan; c. Pembinaan dan penataan kelembagaan kepada RT, RW, LMK, FKMD</p>
<p>Kelemahan (W): a. Keterbatasan Kewenangan Wilayah; b. Sikap mental aparat yang kurang mendukung pelaksanaan pelayanan prima;</p>	<p>Alternatif Strategi (W-O): a. Pembinaan dan penataan aparatur pemerintah yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat; b. Menumbuhkembangkan fungsi lembaga-lambaga sosial kemasyarakatan yang berdaya dan mandiri</p>	<p>Alternatif Strategi (W-T): a. Meningkatkan kualitas sistem koordinasi yang efektif dan efisien dengan seluruh mitra kerja Kota Administrasi Jakarta Pusat; b. Melakukan intensifikasi koordinasi dalam bidang pelaksanaan kota sehat, penanggulangan kemiskinan, kota layak anak, BOP dan BOS, sera keamanan dan ketertiban kota</p>

5.2 Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Kota Administrasi Jakarta Pusat menetapkan strategi diantaranya :

1. Meningkatkan kualitas sistem pelayanan kepada masyarakat dan sistem koordinasi yang efektif dan efisien dengan seluruh mitra kerja Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta perlengkapannya dalam mendukung pengembangan kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan perkantoran untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat;

4. Meningkatkan kualitas pengelolaan kendaraan operasional dalam mendukung terselenggaranya pelayanan prima kepada masyarakat;
5. Meningkatkan kualitas pembinaan, pengawasan dan evaluasi pada kecamatan dan kelurahan.

5.3 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah :

1. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta mengoptimalkan koordinasi lintas bidang urusan bersama seluruh mitra kerja Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Mengoptimalkan kualitas sarana dan prasarana pengembangan kewilayahan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan Dan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
3. Mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan perkantoran untuk meningkatkan kepuasan pelayanan perkantoran dan keprotokolan;
4. Mengoptimalkan penyelenggaraan pengelolaan kendaraan operasional untuk memudahkan kelancaran pelayanan kepada masyarakat;
5. Mengoptimalkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pada kecamatan dan kelurahan untuk meningkatkan capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan.

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan jangka menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

RPJMD PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022			
VISI : Jakarta Kota Maju, Lestari Dan Berbudaya Yang Warganya Terlibat Dalam Mewujudkan Keberadaban Dan Kesejahteraan Bagi Semua			
MISI : Menjadikan Jakarta Tempat Wahana Aparatur Negara Yang Berkarya, Mengabdikan, Melayani, Serta Menyelesaikan Berbagai Permasalahan Kota Dan Warga Secara Efektif Meritokratis, Dan Berintegritas			
RENSTRA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 2017-2022			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat di Wilayah Administrasi Jakarta Pusat untuk menciptakan Jakarta sebagai kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Pusat	Meningkatkan kualitas sistem pelayanan kepada masyarakat dan sistem koordinasi yang efektif dan efisien dengan seluruh mitra kerja Kota Administrasi Jakarta Pusat	Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta mengoptimalkan koordinasi lintas bidang urusan bersama seluruh mitra kerja Kota Administrasi Jakarta Pusat
	Tersedianya sarana dan prasarana serta perlengkapannya sesuai standar yang mendukung pelayanan pengembangan kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta perlengkapannya dalam mendukung pengembangan kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Mengoptimalkan kualitas sarana dan prasarana pengembangan kewilayahan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan Dan Kota Administrasi Jakarta Pusat
	Tersedianya pelayanan perkantoran Kota Administrasi Jakarta Pusat yang berkualitas untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan perkantoran untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat	Mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan perkantoran untuk meningkatkan kepuasan pelayanan perkantoran dan keprotokolan
	Terselenggaranya pengelolaan kendaraan operasional Kota Administrasi Jakarta Pusat yang berkualitas dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas pengelolaan kendaraan operasional dalam mendukung terselenggaranya pelayanan prima kepada masyarakat	Mengoptimalkan penyelenggaraan pengelolaan kendaraan operasional untuk memudahkan kelancaran pelayanan kepada masyarakat
	Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan, kelurahan dan kota Administrasi Jakarta Pusat	Meningkatkan kualitas pembinaan, pengawasan dan evaluasi pada kecamatan dan kelurahan	Mengoptimalkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pada kecamatan dan kelurahan untuk meningkatkan capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/ kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai perangkat daerah unit pembantu Gubernur. Program yang dilaksanakan oleh Kota Administrasi Jakarta Pusat terdiri dari:

A. Program dan Kegiatan Generik

1. **Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan kegiatan :**
 - a. Penyediaan alat tulis kantor Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - b. Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan keamanan kantor Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - c. Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - d. Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat;

- e. Penyediaan sewa mesin foto copy Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- f. Penyediaan Makanan dan Minuman Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- h. Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- i. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- j. Penyediaan Jasa Pengolahan Air Limbah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- k. Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- l. Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Mekanikal Elektrikal Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- m. Pemeliharaan Instalasi ME Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- n. Pemeliharaan AC Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- o. Pemeliharaan Lift Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- p. Pemeliharaan Rumah Dinas Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- q. Pemeliharaan IPAL Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- r. Revitalisasi Sistem Proteksi Kebakaran Gedung Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- s. Pemeliharaan dan Pengecatan Kanstin di lingkungan kompleks Kantor Walikota Jakarta Pusat;
- t. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- u. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat;

- v. Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- w. Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- x. Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- y. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- z. Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- aa. Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- bb. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- cc. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- dd. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- ee. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- ff. Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- gg. Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan keamanan kantor Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- hh. Penyediaan jasa administrasi surat menyurat/ caraka Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- ii. Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat

- jj. Penyediaan Jasa Pengolahan Air Limbah Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat
- kk. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat
- ll. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat
- mm. Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat
- nn. Penyediaan peralatan rumah tangga Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat
- oo. Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat
- pp. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat
- qq. Penyediaan Makanan dan Minuman Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat
- rr. Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat
- ss. Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat
- tt. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat
- uu. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat
- vv. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat
- ww. Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan keamanan kantor Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat

- xx. Penyediaan Jasa Pengolahan Air Limbah Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat
- yy. Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat
- zz. Pengendalian Hama Gedung Kantor Walikota Kota Adm. Jakarta Pusat
- aaa. Pemeliharaan Mesin Genset Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
- bbb. Penyediaan Kerumahtanggaan Rumah Dinas Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
- ccc. Penyediaan Kerumahtanggaan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
- ddd. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
- eee. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
- fff. Penyediaan jasa administrasi surat menyurat/caraka Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat
- ggg. Pemeliharaan Plumbing Kantor Walikota Kota Adm. Jakarta Pusat
- hhh. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat

2. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan kegiatan :

- a. Pemeliharaan KDO Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- b. Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus Kota Administrasi Jakarta Pusat
- c. Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus Kota Administrasi Jakarta Pusat
- d. Pemeliharaan KDO/KDO Khusus Kota Administrasi Jakarta Pusat

- e. Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat
- f. Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat
- g. Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat
- h. Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat
- i. Pemeliharaan KDO Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat

B. Program dan kegiatan Utama/ Teknis

1. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan kegiatan:

- a. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- b. Peningkatan peran kelembagaan RT, RW dan LMK tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- c. Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- d. Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- e. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan penanganan kebersihan lingkungan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- f. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- g. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat;

- h. Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- i. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan tingkat Kelurahan;
- j. Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- k. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- l. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- m. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya tingkat Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- n. Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu tingkat Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- o. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan tingkat Kecamatan;

2. Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan kegiatan :

- a. Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- b. Pengelolaan Ruang Interaksi Warga di kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- c. Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik) di Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- d. Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kota Administrasi Jakarta Pusat;

- e. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- f. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- g. Penyelenggaraan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- h. Penyelenggaraan Ketertiban Umum Tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- i. Rehab Total Kantor Lurah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- j. Perencanaan Rehab Total Kantor Lurah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- k. Rehab Berat Rumah Dinas Lurah Kota Administrasi Jakarta Pusat
- l. Rehab Berat Rumah Dinas Camat Kota Administrasi Jakarta Pusat;

3. Program peningkatan penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan kegiatan :

- a. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- b. Pengurusan perkara di pengadilan tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- c. Penyelesaian Sengketa Pertanahan tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- d. Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- e. Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi Jakarta Pusat;

- f. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- g. Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- h. Pengendalian dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru Pada Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- i. Pengendalian dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- j. Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi Jakarta Pusat
- k. Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- l. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kota Sehat di Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- m. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- n. Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- o. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan BOP dan BOS di Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- p. Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi Jakarta Pusat Dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI);
- q. Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- r. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- s. Pelaksanaan Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi Jakarta Pusat;

- t. Pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- u. Pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan Bencana Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- v. Pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring Penerimaan PBB-P2 Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- w. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan/Rehab Total/Rehab Sedang Kantor Lurah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- x. Pelaksanaan Pendataan, Penyediaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah dan petunjuk arah Kecamatan, Kelurahan dan Kota Administrasi;
- y. Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Sarana dan Prasarana Kota di Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- z. Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- aa. Pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- bb. Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan;
- cc. Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- dd. Penyusunan dan Evaluasi Standar dan Operasional dan Prosedur Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- ee. Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;

- ff. Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- gg. Pelaksanaan Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- hh. Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- ii. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan unit kerja dibawah koordinasi bagian perekonomian;
- jj. Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kepariwisata dan Ketenagakerjaan tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- kk. Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Ketahanan Pangan pada Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- ll. Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Perpasaran Swasta dan Penataan Usaha Kecil dan Menengah tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- mm. Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- nn. Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perhubungan, perindustrian dan energi Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- oo. Pelaksanaan STQ/MTQ tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- pp. Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- qq. Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kartu Jakarta Pintar Plus Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- rr. Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Mental, Spiritual, Perpustakaan dan Arsip;
- ss. Pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan dibawah koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi;

- tt. Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;
- uu. Penataan Arsip Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- vv. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- ww. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan anggaran Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- xx. Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- yy. Pelaksanaan Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- zz. Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- aaa. Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Secara terperinci, uraian program, kegiatan, indikator beserta pagu indikatif disajikan dalam Tabel 6.1 di bawah ini.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Pada Akhir Periode		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi			
									2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp					
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat di Wilayah Administrasi Jakarta Selatan Jakarta Pusat untuk menciptakan Jakarta sebagai kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua	Tersedianya pelayanan perkantoran Kota Administrasi Jakarta Selatan yang berkualitas untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat	1	3	3		Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi Jakarta Pusat	indeks kepuasan pelayanan kantor	4	4	70,236,992,704	4	94,208,763,228	4	106,146,443,527	4	115,201,743,682	4	130,489,761,136	4						
		6	1	5	1	Penyediaan alat tulis kantor Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tersedianya Alat Tulis Kantor Kota Administrasi Jakarta Pusat			477,573,304		525,330,634		577,863,698		635,650,068		699,215,074					Bagian Umum dan Protokol		
		6	1	5	4	Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan keamanan kantor Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tersedianya jasa dan pengadaan perlengkapan keamanan kantor Kota Administrasi Jakarta Pusat			7,127,133,961		7,839,847,357		8,623,832,093		9,486,215,302		10,434,836,832						Bagian Umum dan Protokol	
		6	1	5	7	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tersedianya Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat			7,366,123,200		8,102,735,520		8,913,009,072		9,804,309,979		10,784,740,977						Bagian Umum dan Protokol	
		6	1	6	0	Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tersedianya jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat			4,653,270,699		5,118,597,769		5,630,457,546		6,193,503,300		6,812,853,630						Bagian Umum dan Protokol	
		6	1	6	6	Penyediaan sewa mesin foto copy Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tersedianya sewa mesin foto copy Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat			172,526,640		189,779,304		208,757,234		229,632,959		252,596,254						Bagian Umum dan Protokol	
		6	1	7	1	Penyediaan Makanan dan Minuman Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tersedianya Makanan dan Minuman Kota Administrasi Jakarta Pusat			1,399,255,000		571,120,000		628,232,000		691,055,200		760,160,720						Bagian Umum dan Protokol	
		6	1	7	3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat			206,947,158		247,641,873		250,406,061		275,446,667		302,991,334						Bagian Umum dan Protokol	
		6	1	7	8	Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tersedianya jasa administrasi keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat			17,085,750		18,794,325		20,673,358		22,741,133		25,015,247						Bagian Umum dan Protokol	
		6	1	8	5	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kerja Kota Administrasi Jakarta Pusat			308,482,689		339,330,958		373,264,054		410,590,460		451,649,505						Bagian Umum dan Protokol	

RENCANA STRATEGIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Pada Akhir Periode		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi			
									2018		2019		2020		2021		2022				Target	Rp	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		6	1	9	1	Penyediaan Jasa Pengolahan Air Limbah Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tersedianya Jasa Pengolahan Air Limbah Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat			100,425,534		-		-		-		-				Bagian Umum dan Protokol	
		6	3	7	3	Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terisinya Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Kota Administrasi Jakarta Pusat			46,865,830		51,552,413		56,707,654		62,378,420		68,616,262				Bagian Umum dan Protokol	
		6	3	7	4	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Mekanikal Elektrikal Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tersedianya Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Mekanikal Elektrikal Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat			962,555,698		1,058,811,268		1,164,692,395		1,281,161,634		1,409,277,797				Bagian Umum dan Protokol	
		6	3	7	5	Pemeliharaan Instalasi ME Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terpeliharanya Instalasi ME Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat			199,375,990		219,313,589		241,244,948		265,369,442		291,906,387				Bagian Umum dan Protokol	
		6	3	7	6	Pemeliharaan AC Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terpeliharanya AC Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat			985,568,735		1,084,125,609		1,192,538,169		1,311,791,986		1,442,971,185				Bagian Umum dan Protokol	
		6	3	7	7	Pemeliharaan Lift Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terpeliharanya Lift Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat			792,504,592		871,755,051		958,930,556		1,054,823,612		1,160,305,973				Bagian Umum dan Protokol	
		6	3	7	8	Pemeliharaan Rumah Dinas Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terpeliharanya Rumah Dinas Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat			153,772,891		169,150,180		186,065,198		204,671,718		225,138,890				Bagian Umum dan Protokol	
		6	3	8	2	Pemeliharaan IPAL Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terpeliharanya IPAL Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat			-		110,468,087		121,514,896		133,666,386		147,033,024				Bagian Umum dan Protokol	
		6	3	9	1	Revitalisasi Sistem Proteksi Kebakaran Gedung Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Revitalisasi Sistem Proteksi Kebakaran Gedung Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat			-		-		-		-		3,000,000,000				Bagian Umum dan Protokol	
		6	3	9	2	Pemeliharaan dan Pengecatan Kanstin di lingkungan komplek Kantor Walikota Jakarta Pusat	Terpelihara dan terlaksananya Pengecatan Kanstin di lingkungan komplek Kantor Walikota Jakarta Pusat			-		110,000,000		120,000,000		130,000,000		140,000,000				Bagian Umum dan Protokol	
		7	7	7	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Gedung Kantor			-		3,929,440,101		4,322,384,112		4,754,622,523		5,230,084,775				Kelurahan	

RENCANA STRATEGIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Pada Akhir Periode		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi				
									2018		2019		2020		2021		2022				Target	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
						Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat																	
		7	7	7	7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Rumah Dinas Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat			-		1,472,042,277		1,692,848,619		1,946,775,912		2,238,792,299					Kelurahan	
		7	7	7	8	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tersedianya Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat			10,938,563,286		12,032,419,615		13,235,661,576		14,559,227,734		16,015,150,507						Kelurahan
		7	7	7	9	Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tersedianya peralatan rumah tangga Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat			746,663,808		836,263,465		936,615,081		1,049,008,890		1,174,889,957						Kelurahan
		7	7	8	0	Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tersedianya Alat Tulis Kantor Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat			2,400,171,474		2,640,188,621		2,904,207,484		3,194,628,232		3,514,091,055						Kelurahan
		7	7	8	2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat			753,797,850		829,177,635		912,095,399		1,003,304,938		1,103,635,432						Kelurahan
		7	7	8	5	Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tersedianya Makanan dan Minuman Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat			11,779,822,236		12,957,804,460		14,253,584,906		15,678,943,396		17,246,837,736						Kelurahan
		7	7	8	7	Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tersedianya Sewa Mesin Foto Copy Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat			1,876,287,600		2,063,916,360		2,270,307,996		2,497,338,796		2,747,072,675						Kelurahan
		7	7	8	8	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat			270,147,615		302,565,329		338,873,168		379,537,948		425,082,502						Kelurahan
		7	7	8	9	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat			-		7,744,455,514		8,673,790,175		9,714,644,996		10,880,402,396						Kelurahan
		7	7	9	1	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kerja Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat			2,695,162,022		3,018,581,465		3,380,811,240		3,786,508,589		4,240,889,620						Kelurahan

RENCANA STRATEGIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Pada Akhir Periode		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi			
									2018		2019		2020		2021		2022				Target	Rp	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		7	7	9	3	Pemeliharaan rutin/berkala mebelair Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terpeliharanya secara rutin dan berkala mebelair Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat			30,420,500		41,067,675		55,441,361		74,845,838		101,041,881				Kelurahan	
		7	7	9	5	Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tersedianya jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat			1,467,498,385		1,643,598,191		1,840,829,974		2,061,729,571		2,309,137,120				Kelurahan	
		7	7	9	6	Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan keamanan kantor Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tersedianya jasa dan pengadaan perlengkapan keamanan kantor Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat			932,800		1,399,200		2,098,800		3,148,200		4,722,300				Kelurahan	
		7	7	9	8	Penyediaan jasa administrasi surat menyurat/ caraka Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tersedianya jasa administrasi surat menyurat/ caraka Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat			1,120,000		1,680,000		2,520,000		3,780,000		5,670,000				Kelurahan	
		7	8	0	0	Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terisinya Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat			57,171,840		154,000,000		172,480,000		193,177,600		216,358,912				Kelurahan	
		7	8	0	1	Penyediaan Jasa Pengolahan Air Limbah Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tersedianya Penyediaan Jasa Pengolahan Air Limbah Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat			10,280,000		15,420,000		23,130,000		34,695,000		52,042,500				Kelurahan	
		7	8	0	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terpeliharanya secara Rutin dan Berkala Gedung Kantor Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat					1,374,395,420		1,511,834,962		1,663,018,458		1,829,320,304				Kecamatan	
		7	8	0	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terpeliharanya secara Rutin dan Berkala Rumah Dinas Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat					207,940,418		270,322,544		351,419,307		456,845,099				Kecamatan	
		7	8	0	5	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tersedianya Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat			4,043,169,330		4,447,486,263		4,892,234,889		5,381,458,378		5,919,604,216				Kecamatan	

RENCANA STRATEGIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Pada Akhir Periode		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi				
									2018		2019		2020		2021		2022				Target	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		7	8	0	6	Penyediaan peralatan rumah tangga Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tersedianya peralatan rumah tangga Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat			104,242,728		116,751,855		130,762,078		146,453,527		164,027,951					Kecamatan	
		7	8	0	7	Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tersedianya Alat Tulis Kantor Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat			363,297,056		399,626,762		439,589,438		483,548,382		531,903,220					Kecamatan	
		7	8	0	8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat			86,786,092		95,464,701		105,011,171		115,512,288		127,063,517					Kecamatan	
		7	8	0	9	Penyediaan Makanan dan Minuman Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tersedianya Makanan dan Minuman Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat			2,016,474,110		2,218,121,521		2,439,933,673		2,683,927,040		2,952,319,744					Kecamatan	
		7	8	1	0	Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tersedianya jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat			2,819,656,243		3,101,621,867		3,411,784,054		3,752,962,459		4,128,258,705					Kecamatan	
		7	8	1	1	Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tersedianya Sewa Mesin Foto Copy Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat			334,921,620		368,413,782		405,255,160		445,780,676		490,358,744					Kecamatan	
		7	8	1	2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat			31,081,060		34,810,787		38,988,082		43,666,651		48,906,650					Kecamatan	
		7	8	1	3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat					1,093,769,700		1,203,146,670		1,323,461,337		1,455,807,471					Kecamatan	
		7	8	3	4	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kerja Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat			515,093,009		566,602,310		623,262,541		685,588,795		754,147,674					Kecamatan	
		7	8	3	6	Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan keamanan kantor Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tersedianya jasa dan pengadaan perlengkapan keamanan kantor Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat			1,227,436,954		1,374,729,388		1,539,696,915		1,724,460,545		1,931,395,810					Kecamatan	

RENCANA STRATEGIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Pada Akhir Periode		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi				
									2018		2019		2020		2021		2022				Target	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		7	8	3	7	Penyediaan Jasa Pengolahan Air Limbah Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tersedianya Jasa Pengolahan Air Limbah Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat			5,500,000		6,500,000		7,500,000		8,500,000		9,500,000					Kecamatan	
		7	8	3	8	Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terisinya Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat					28,000,000		31,360,000		35,123,200		39,337,984					Kecamatan	
		7	8	4	5	Pengendalian Hama Gedung Kantor Walikota Kota Adm. Jakarta Pusat	Terkendalinya Hama Gedung Kompleks Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat			154,176,000		169,593,000		186,552,960		205,208,256		225,729,082					Bagian Umum dan Protokol	
		7	8	5	0	Pemeliharaan Mesin Genset Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terpeliharanya Mesin Genset Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat			87,056,580		95,762,238		105,338,462		115,872,308		127,459,539					Bagian Umum dan Protokol	
		7	8	5	6	Penyediaan Kerumahtanggaan Rumah Dinas Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tersedianya Kerumahtanggaan Rumah Dinas Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat					110,000,000		121,000,000		133,100,000		146,410,000					Bagian Umum dan Protokol	
		7	8	5	9	Penyediaan Kerumahtanggaan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tersedianya Kerumahtanggaan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat					448,858,587		493,744,446		543,118,890		597,430,779					Bagian Umum dan Protokol	
		7	8	7	2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat					366,561,680		2,403,217,848		443,539,633		487,893,569					Bagian Umum dan Protokol	
		7	8	9	7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat					715,328,599		786,861,458		865,547,604		952,102,365					Bagian Umum dan Protokol	
		8	4	5	1	Penyediaan jasa administrasi surat menyurat/caraka Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tersedianya jasa administrasi surat menyurat/caraka Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat			300,805,338		406,087,206		548,217,729		740,093,933		999,126,810					Kecamatan	
		1	0	2	44	Pemeliharaan Plumbing Kantor Walikota Kota Adm. Jakarta Pusat	Terpeliharanya Plumbing Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat			136,330,268		149,963,299		164,959,624		181,455,586		199,601,145					Bagian Umum dan Protokol	
		1	0	4	89	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kelurahan	Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah Kelurahan			13,459,229		-		-		-		-					Kelurahan	

RENCANA STRATEGIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Pada Akhir Periode		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi			
									2018		2019		2020		2021		2022				Target	Rp	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
						Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kota Administrasi Jakarta Pusat																
	Meningkatnya kualitas pengelolaan kendaraan operasional Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat	1	9	1		Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi Jakarta Pusat	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	4	4		4		4		4		4		4				
		6	1	4	0	Pemeliharaan KDO Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terpeliharanya KDO Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat					76,939,411				84,633,352		93,096,687					Kecamatan
		6	1	4	6	Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tersedianya jasa perizinan KDO/KDO khusus Kota Administrasi Jakarta Pusat			34,689,600		38,158,560				41,974,416		46,171,857					Bagian Umum dan Protokol
		6	1	4	8	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tersedianya BBM KDO/KDO Khusus Kota Administrasi Jakarta Pusat			149,625,000		164,587,500				181,046,250		199,150,875					Bagian Umum dan Protokol
		6	3	8	4	Pemeliharaan KDO/KDO Khusus Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terpeliharanya KDO/KDO Khusus Kota Administrasi Jakarta Pusat			-		239,701,932				263,672,125		290,039,337					Bagian Umum dan Protokol
		7	7	6	4	Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tersedianya jasa perizinan KDO/KDO khusus Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat			28,504,300		31,354,730				34,490,203		37,939,223					Kecamatan
		7	7	6	5	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tersedianya BBM KDO/KDO Khusus Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat			191,600,640		210,760,704				231,836,774		255,020,452					Kecamatan
		7	7	6	7	Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tersedianya jasa perizinan KDO/KDO khusus Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat			443,857,230		476,221,558				533,368,145		597,372,323					Kelurahan
		7	7	6	8	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tersedianya BBM KDO/KDO Khusus Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat			3,251,969,526		3,577,166,479				3,934,883,126		4,328,371,439					Kelurahan
		7	7	7	0	Pemeliharaan KDO Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terpeliharanya KDO Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat					2,863,037,563				3,149,341,319		3,464,275,451					Kelurahan
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota	3	2	7		Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Persentase Terbinaanya Lembaga Kemasyarakatan	80	0		90	3,181,395,451		90		100		100					

RENCANA STRATEGIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Pada Akhir Periode		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi							
									2018		2019		2020		2021		2022				Target	Rp					
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
Administrasi Jakarta Pusat	Administrasi Jakarta Pusat	7	7	5	6	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kota Administrasi Jakarta Pusat						267,000,000		292,000,000		312,000,000		330,000,000					Bagian Tata Pemerintahan			
								Persentase penanganan perkara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat	100	0		100		100		100		100		100							
		7	9	9	0	Pengurusan perkara di pengadilan tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terselesaikannya perkara di pengadilan tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat						127,440,000		127,440,000		127,440,000		127,440,000					Bagian Hukum			
								Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum	100	0		100		100		100		100		100		100					
		7	9	9	2	Penyelesaian Sengketa Pertanahan tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terselesaikannya Sengketa Pertanahan tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat							49,500,000		49,500,000		49,500,000		49,500,000					Bagian Hukum		
								Persentase Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	88	0		88		90		91		91		91		360					
		7	9	9	5	Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat	Meningkatnya Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat							223,350,000		223,350,000		223,350,000		223,350,000					Bagian Hukum		
		7	9	9	6	Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi Jakarta Pusat	Meningkatkan dan membina Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi Jakarta Pusat							122,450,000		122,450,000		122,450,000		122,450,000					Bagian Hukum		
								Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip)	0	0		100		100		100		100		100		100					
		6	9	2	1	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Pusat							15,972,629		16,317,382		16,696,632		17,113,804					Bagian Kepegawaian, Tata Laksana dan pelayanan Publik		
		7	8	8	7	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tersusunnya Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat							17,435,212		17,990,224		18,600,758		19,272,342					Bagian Kepegawaian, Tata Laksana dan pelayanan Publik		
								Persentase Jumlah Wirausaha Baru Yang Tercapai	0	0		100		100		100		100		100		100					

RENCANA STRATEGIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Pada Akhir Periode		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi			
									2018		2019		2020		2021		2022				Target	Rp	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		7	9	6	3	Pengendalian dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru Pada Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru Pada Kota Administrasi Jakarta Pusat					25,000,000		30,750,000		35,562,500		39,509,375				Bagian Perekonomian	
							Jumlah Kawasan yang tertata	0	0		4		4		4		4		4				
		7	0	0	5	Pengendalian dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terkendali dan Terevaluasinya Penataan Kawasan di Kota Administrasi Jakarta Pusat					23,500,000		25,850,000		28,435,000		31,278,500				Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup	
							Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	4	0		4		4		4		4		4				
		7	9	3	8	Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terseleenggaranya Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi Jakarta Pusat					164,771,556		181,248,712		199,373,583		219,310,941				Bagian Umum dan Protokol	
		7	9	3	9	Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi Jakarta Pusat.	Terlaksananya Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi Jakarta Pusat					349,611,108		384,572,218		423,029,440		465,332,384				Bagian Umum dan Protokol	
							Koordinasi Pelaksanaan Kota Sehat	100	0		100		100		100		100		100				
		8	0	1	0	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kota Sehat di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terkendali dan Terevaluasinya Pelaksanaan Kota Sehat di Kota Administrasi Jakarta Pusat					6,750,000		2,232,000		6,750,000		8,480,000				Bagian Kesejahteraan Rakyat	
							Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota	100	0		100		100		100		100		100				
		8	0	1	4	Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terkendali dan Terevaluasinya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi Jakarta Pusat					8,480,000		8,480,000		8,480,000		8,480,000				Bagian Kesejahteraan Rakyat	
							Koordinasi Pelaksanaan Kota Administrasi Jakarta Pusat Kota Layak Anak	100	0		100		100		100		100		100				

RENCANA STRATEGIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Pada Akhir Periode		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi			
									2018		2019		2020		2021		2022				Target	Rp	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		8	0	1	6	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terkendali dan terevaluasinya Pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota Administrasi Jakarta Pusat					6,760,000		6,760,000		6,760,000		6,760,000				Bagian Kesejahteraan Rakyat	
							Koordinasi pelaksanaan BOP dan BOS	100	0		100		100		100		100		100				
		8	0	1	9	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan BOP dan BOS di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terkendali dan Terevaluasinya Pelaksanaan BOP dan BOS di Kota Administrasi Jakarta Pusat					8,125,000		9,750,000		11,375,000		13,000,000				Bagian Kesejahteraan Rakyat	
							Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Pusat > 80 %	100	0		100		100		100		100		100				
		6	9	1	1	Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi Jakarta Pusat Dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	Terlaksananya Partisipasi Kota Administrasi Jakarta Pusat Dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)					55,000,000		55,000,000		55,000,000		55,000,000				Bagian Tata Pemerintahan	
		7	7	5	9	Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat					50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000				Bagian Tata Pemerintahan	
		7	7	6	0	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Pusat					46,000,000		48,000,000		50,000,000		55,000,000				Bagian Tata Pemerintahan	
		1	0	7	06	Pelaksanaan Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi Jakarta Pusat					126,000,000		138,600,000		143,000,000		157,300,000				Bagian Tata Pemerintahan	
		1	0	7	08	Pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya koordinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Pusat					28,000,000		30,800,000		31,400,000		32,400,000				Bagian Tata Pemerintahan	
		1	0	7	10	Pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan Bencana Kota Administrasi Jakarta	Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Bencana Kota Administrasi Jakarta					6,000,000		6,600,000		7,600,000		8,300,000				Bagian Tata Pemerintahan	

RENCANA STRATEGIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Pada Akhir Periode		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi			
									2018		2019		2020		2021		2022				Target	Rp	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		1	0	7	29	Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tertagihnya Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi Jakarta Pusat					45,000,000		49,500,000		54,450,000		59,895,000				Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup	
		1	0	7	15	Penyusunan dan Evaluasi Standar dan Operasional dan Prosedur Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tersusun dan Terevaluasinya Standar dan Operasional dan Prosedur Kota Administrasi Jakarta Pusat					55,174,993		55,584,985		56,035,993		57,474,248				Bagian Kepegawaian, Tata Laksana dan pelayanan Publik	
		7	9	0	5	Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terkendali dan Terevaluasinya Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat					27,165,863		27,357,493		27,549,124		27,740,754				Bagian Kepegawaian, Tata Laksana dan pelayanan Publik	
		7	9	1	1	Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terkendali dan Terevaluasinya Pelayanan Publik tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat					14,889,019		15,118,974		11,511,984		15,578,885				Bagian Kepegawaian, Tata Laksana dan pelayanan Publik	
		1	0	7	18	Pelaksanaan Koordinasi dan Pengukuran Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Koordinasi dan Pengukuran Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi Jakarta Pusat					11,280,159		11,511,984		11,743,810		10,779,108				Bagian Kepegawaian, Tata Laksana dan pelayanan Publik	
		1	0	7	16	Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terbinanya Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Pusat					59,663,704		60,462,411		68,923,989		62,181,566				Bagian Kepegawaian, Tata Laksana dan pelayanan Publik	
		1	0	7	22	Pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan unit kerja dibawah koordinasi bagian perekonomian	Terlaksananya koordinasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan unit kerja dibawah koordinasi bagian perekonomian					5,100,000.00		5,100,000.00		5,100,000.00		5,100,000.00				Bagian Perekonomian	
		1	0	7	20	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kepariwisata dan Ketenagakerjaan tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kepariwisata dan Ketenagakerjaan tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat					29,218,000		32,229,300		37,444,555		39,335,149				Bagian Perekonomian	

RENCANA STRATEGIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Pada Akhir Periode		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi			
									2018		2019		2020		2021		2022				Target	Rp	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		1	0	7	23	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Ketahanan Pangan pada Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Ketahanan Pangan pada Kota Administrasi Jakarta Pusat					21,050,000		23,870,000		27,777,000		30,851,450				Bagian Perekonomian	
		1	0	7	24	Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Perpasaran Swasta dan Penataan Usaha Kecil dan Menengah tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Koordinasi Pengawasan Perpasaran Swasta dan Penataan Usaha Kecil dan Menengah tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat					4,150,000.00		4,150,000.00		4,150,000.00		4,150,000.00				Bagian Perekonomian	
		1	0	7	25	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Kota Administrasi Jakarta Pusat					14,960,000		14,960,000		14,960,000		14,960,000				Bagian Perekonomian	
		1	0	7	26	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perhubungan, perindustrian dan energi Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perhubungan, perindustrian dan energi Kota Administrasi Jakarta Pusat					11,090,000		13,540,000		16,040,000		20,040,000				Bagian Perekonomian	
		8	0	2	2	Pelaksanaan STQ/MTQ tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya STQ/MTQ tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat					100,000,000		150,000,000		200,000,000		250,000,000				Bagian Kesejahteraan rakyat	
		1	0	7	37	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Pusat					36,566,000		36,566,000		36,566,000		36,566,000				Bagian Kesejahteraan rakyat	
		1	0	7	38	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kartu Jakarta Pintar Plus Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kartu Jakarta Pintar Plus Kota Administrasi Jakarta Pusat					1,080,000.00		1,080,000.00		1,080,000.00		1,080,000.00				Bagian Kesejahteraan rakyat	
		1	0	7	40	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Mental, Spiritual, Perpustakaan dan Arsip	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Mental, Spiritual, Perpustakaan dan Arsip					45,570,000.00		45,570,000.00		45,570,000.00		45,570,000.00				Bagian Kesejahteraan rakyat	

RENCANA STRATEGIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Pada Akhir Periode		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi				
									2018		2019		2020		2021		2022				Target	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		1	0	7	42	Pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan dibawah koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi...	Terlaksananya koordinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan dibawah koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi...					7,150,000.00		7,150,000.00		7,150,000.00		7,150,000.00					Bagian Kesejahteraan rakyat	
		1	0	7	43	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk					13,000,000.00		13,000,000.00		13,000,000.00		13,000,000.00					Bagian Kesejahteraan rakyat	
		8	0	3	1	Penataan Arsip Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Penataan Arsip Kota Administrasi Jakarta Pusat					20,000,000		22,000,000		24,200,000		26,620,000					Bagian Umum dan Protokol	
		1	0	7	32	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi Jakarta Pusat					8,580,000.00		12,500,000.00		15,500,000.00		17,500,000.00					Bagian Keuangan	
		1	0	7	33	Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan anggaran Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terkendali dan Terevaluasinya pelaksanaan anggaran Kota Administrasi Jakarta Pusat					13,960,000.00		20,148,000.00		23,487,200.00		28,686,560.00					Bagian Keuangan	
		1	0	7	34	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat					18,800,000		22,560,000		27,072,000		32,486,400					Bagian Keuangan	
		1	0	7	35	Pelaksanaan Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kota Administrasi Jakarta Pusat					8,100,000		9,720,000		11,664,000		13,996,800					Bagian Keuangan	
		8	7	5	2	Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi Jakarta Pusat					350,371,208		570,208,329		608,749,162		651,144,078					Bagian Tata Pemerintahan	
		8	7	6	6	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat					520,000,000		624,000,000		748,800,000		898,560,000					Bagian Kesejahteraan rakyat	

RENCANA STRATEGIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Pada Akhir Periode		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi			
									2018		2019		2020		2021		2022				Target	Rp	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	Mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan, kelurahan dan kota Administrasi Jakarta Pusat	3	2	8		Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	0	0		92	134,785,221,433	94	133,868,162,493	96	137,700,630,329	98	148,546,237,539	98				
		9	0	2	4	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat					6,810,012,000		7,491,013,200		8,240,114,520		9,064,125,972				Kelurahan	
		9	0	3	1	Peningkatan peran kelembagaan RT, RW dan LMK tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Meningkatnya peran kelembagaan RT, RW dan LMK tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat					99,325,200,000		99,325,200,000		99,325,200,000		99,325,200,000				Kelurahan	
		9	0	2	7	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat					1,803,925,413		2,020,396,462		2,262,844,038		2,534,385,322				Kelurahan	
		9	0	1	7	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terseleenggaranya Musrenbang Tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat					1,003,063,600		1,103,369,960		1,213,706,956		1,335,077,652				Kelurahan	
		9	0	2	8	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan penanganan kebersihan lingkungan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan penanganan kebersihan lingkungan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat					11,323,020,420		12,681,782,871		14,203,596,815		15,908,028,433				Kelurahan	
		9	1	7	3	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terseleenggaranya Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat					2,860,000,000		3,203,200,000		3,587,584,000		4,018,094,080				Kelurahan	
		9	1	7	4	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat					2,860,000,000		3,203,200,000		3,587,584,000		4,018,094,080				Kelurahan	
		9	1	7	5	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terseleenggaranya Posko Bersama Pemilu tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat					4,400,000,000		-		-		6,623,232,000				Kelurahan	

RENCANA STRATEGIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Pada Akhir Periode		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi			
									2018		2019		2020		2021		2022				Target	Rp	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		8	7	5	2	Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat	Meningkatnya Tugas dan Fungsi Dewan Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat			535,171,208												Bagian Tata Pemerintahan	
		8	7	5	3	Rehab Total Kantor Lurah Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Rehab Total Kantor Lurah Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat			7,718,373,725												Bagian Tata Pemerintahan	
		8	7	5	4	Rehab Total Kantor Lurah Kramat Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Rehab Total Kantor Lurah Kramat Kota Administrasi Jakarta Pusat			7,718,373,725												Bagian Tata Pemerintahan	
		8	7	5	5	Rehab Berat Kantor Camat Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Rehab Berat Kantor Camat Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat			4,136,293,469												Bagian Tata Pemerintahan	
		8	7	5	7	Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi Jakarta Pusat Dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	Terlaksananya Partisipasi Kota Administrasi Jakarta Pusat Dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)			55,000,000												Bagian Tata Pemerintahan	
		8	7	5	9	Rehab Total Rumah Dinas Kelurahan Serdang Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Rehab Total Rumah Dinas Kelurahan Serdang Kota Administrasi Jakarta Pusat			648,519,859												Bagian Tata Pemerintahan	
		8	7	6	2	Rehab Total Rumah Dinas Kelurahan Petamburan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Rehab Total Rumah Dinas Kelurahan Petamburan Kota Administrasi Jakarta Pusat			648,519,859												Bagian Tata Pemerintahan	
		8	7	6	4	Pengurusan Perkara Di Pengadilan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terselesaikannya Pengurusan Perkara di Pengadilan Kota Administrasi Jakarta Pusat			190,555,000												Bagian Hukum	
		8	7	6	6	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat			4,040,000												Bagian Kesejahteraan Rakyat	
		8	7	6	9	Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terselenggaranya Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi Jakarta Pusat			457,928,680												Bagian Umum dan Protokol	
		8	7	7	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Blok A, B, C, D dan Masjid Kota Administrasi	Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Gedung Kantor Blok A, B, C, D dan Masjid Kota Administrasi			826,763,602												Bagian Umum dan Protokol	

RENCANA STRATEGIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Pada Akhir Periode		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi				
									2018		2019		2020		2021		2022				Target	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		8	7	7	4	Jakarta Pusat Penyediaan Kerumahtanggaan Kantor Walikota (Sarana dan Prasarana Operasional Kantor) Kota Administrasi Jakarta Pusat	Jakarta Pusat Tersedianya Kerumahtanggaan Kantor Walikota (Sarana dan Prasarana Operasional Kantor) Kota Administrasi Jakarta Pusat			253,874,060													Bagian Umum dan Protokol	
		8	7	7	5	Pemeliharaan KDO/KDO Khusus Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terpeliharanya KDO/KDO Khusus Kota Administrasi Jakarta Pusat			223,578,927													Bagian Umum dan Protokol	
		8	7	8	7	Penyusunan RENSTRA Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tersusunnya RENSTRA Kota Administrasi Jakarta Pusat			66,000,000													Bagian Tata Pemerintahan	
		8	7	8	9	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kantor Walikota Jakarta Pusat	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kantor Walikota Jakarta Pusat			333,237,891													Bagian Umum dan Protokol	
		3	8	1		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	0	100	389,087,909,203	0		0		0		0		100					
		9	0	0	7	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat			1,682,400,000													Kecamatan	
		9	0	0	8	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat			436,157,000													Kecamatan	
		9	0	0	9	Penyelenggaraan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Penyelenggaraan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat			1,506,479,033													Kecamatan	
		9	0	1	0	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat			127,141,407													Kecamatan	

RENCANA STRATEGIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Pada Akhir Periode		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi				
									2018		2019		2020		2021		2022				Target	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		9	0	1	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Gedung Kantor Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat			1,249,450,382												Kecamatan		
		9	0	1	3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat			994,336,091													Kecamatan	
		9	0	1	4	Pemeliharaan KDO Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terpeliharanya KDO Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat			134,469,963													Kecamatan	
		9	0	1	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat			159,954,168													Kecamatan	
		9	0	1	6	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat			6,009,875,650													Kelurahan	
		9	0	1	0	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terseleenggaranya Musrenbang Tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat			911,876,000													Kelurahan	
		9	0	1	8	Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik) Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terkendalinya Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik) di Kota Administrasi Jakarta Pusat			35,761,897,556													Kelurahan	
		9	0	2	1	Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kota Administrasi Jakarta Pusat			15,564,686,030													Kelurahan	
		9	0	2	2	Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat			169,464,339,666													Kelurahan	

RENCANA STRATEGIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Pada Akhir Periode		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi						
									2018		2019		2020		2021		2022				Target	Rp				
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
		9	0	2	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Pusat Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat			3,572,218,274													Kelurahan			
		9	0	2	4	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat			6,190,920,000														Kelurahan		
		9	0	2	5	Penyelenggaraan Ketertiban Umum Tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terselenggaranya Ketertiban Umum Tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat			4,801,373,288															Kelurahan	
		9	0	2	7	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat			1,610,647,690															Kelurahan	
		9	0	2	8	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan penanganan kebersihan lingkungan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan penanganan kebersihan lingkungan di Kota Administrasi Jakarta Pusat			10,109,839,661															Kelurahan	
		9	0	2	9	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat			6,914,692,423															Kelurahan	
		9	0	3	0	Pemeliharaan KDO Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terpeliharanya KDO Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat			2,602,761,421															Kelurahan	
		9	0	3	1	Peningkatan peran kelembagaan RT, RW dan LMK tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Peningkatan peran kelembagaan RT, RW dan LMK tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat			99,325,200,000															Kelurahan	
		9	1	0	5	Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) tingkat kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) tingkat kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat			18,677,156,737															Kelurahan	

RENCANA STRATEGIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Pada Akhir Periode		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi			
									2018		2019		2020		2021		2022				Target	Rp	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		9	1	0	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Rumah Dinas Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat			1,280,036,763												Kelurahan	
	Tersedianya sarana dan prasarana serta perlengkapannya sesuai standar yang mendukung pelayanan pengembangan kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	3	2	9		Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kota Administrasi Jakarta Pusat	4	0		4	277,494,675,475	4	306,318,079,537	4	338,184,914,478	4	373,423,686,966	4				
		6	9	2	4	Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat					186,410,773,633		205,051,850,996		225,557,036,095		248,112,739,705				Kelurahan	
		6	9	2	6	Pengelolaan Ruang Interaksi Warga di Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) tingkat kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat					21,478,730,245		24,700,539,785		28,405,620,752		32,666,463,865				Kelurahan	
		6	9	2	9	Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik) di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terkendalinya Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik) di Kota Administrasi Jakarta Pusat					39,338,087,312		43,271,896,043		47,599,085,647		52,358,994,212				Kelurahan	
		6	9	3	0	Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kota Administrasi Jakarta Pusat					17,121,154,633		18,833,270,096		20,716,597,106		22,788,256,817				Kelurahan	
		6	9	3	7	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat					301,559,500		331,715,450		364,886,995		401,375,695				Kecamatan	

RENCANA STRATEGIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Pada Akhir Periode		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi				
									2018		2019		2020		2021		2022				Target	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		6	9	9	7	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat					6,610,863,215		7,271,949,537		7,999,144,490		8,799,058,939					Kelurahan	
		7	8	3	9	Penyelenggaraan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terselenggaranya Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat					951,996,320		1,047,195,952		1,151,915,547		1,267,107,102					Kecamatan	
		7	8	4	6	Penyelenggaraan Ketertiban Umum Tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terselenggaranya Ketertiban Umum Tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat					5,281,510,617		5,809,661,678		6,390,627,846		7,029,690,631					Kelurahan	
							Jumlah Kantor Lurah/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar	0	55		59	27,291,000,000	64	30,521,600,000	69	32,305,000,000	73	35,995,000,000	73					
		7	8	9	9	Rehab Total Kantor Lurah Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Rehab Total Kantor Lurah Kota Administrasi Jakarta Pusat					25,466,000,000		29,166,600,000		30,830,000,000		33,910,000,000					Bagian tata Pemerintahan	
		7	9	0	8	Perencanaan Rehab Total Kantor Lurah Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Perencanaan Rehab Total Kantor Lurah Kota Administrasi Jakarta Pusat					675,000,000		705,000,000		775,000,000		835,000,000					Bagian tata Pemerintahan	
		7	9	2	0	Rehab Berat Rumah Dinas Lurah Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Rehab Berat Rumah Dinas Lurah Kota Administrasi Jakarta Pusat					300,000,000		650,000,000		700,000,000		350,000,000					Bagian tata Pemerintahan	
							Jumlah Kantor Camat/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar	0	15		15	850,000,000	15	30,521,600,000	15	32,305,000,000	16	900,000,000	16					
		7	9	5	3	Rehab Berat Rumah Dinas Camat Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Rehab Berat Rumah Dinas Camat Kota Administrasi Jakarta Pusat					850,000,000		-				900,000,000					Bagian tata Pemerintahan	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

Kinerja penyelenggaraan urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan Kota Administrasi Jakarta Pusat yang mengemban urusan pemerintahan umum sesuai pembagian bidang urusan dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1 Indikator Kota Administrasi Jakarta Pusat

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		-	80	82	83	85	85
2	Persentase Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan		-	100	100	100	100	100
3	Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum		-	100	100	100	100	100
4	Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip)		-	100	100	100	100	100
5	Persentase Jumlah Wirausaha Baru Yang Tercapai		-	100	100	100	100	100
6	Jumlah Kawasan yang Tertata		-	4	4	4	4	4
7	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan		-	4	4	4	4	4
8	Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Pusat > 80 %		-	100	100	100	100	100



Bagian Tata Pemerintahan
Kota Administrasi Jakarta Pusat

Jalan Tanah Abang I No.1, Petojo Selatan, Gambir
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10160.
Telp. 021-3447466